

ICW DESAK KPK PERIKSA MENANTU JOKOWI

JAKARTA, BN - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil menantu kesayangan mantan presiden Joko Widodo yang juga Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk diperiksa dalam kasus korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut nonaktif Topan Obaja Putra Ginting.

“Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa dan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk



Gubernur Sumut Menantu Jokowi Bobby Nasution. (ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

PROYEK PASAR INDUK BANYUWANGI RP 152 M DISOROT



BANYUWANGI, BN - Proyek pembangunan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dan Asrama Inggris di Kabupaten Banyuwangi dipertanyakan? Pasalnya, dari pengawasan dan pantauan oleh Tim Bidik Nasional (BN), nampak masih dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Lince Romauli Raya dan PT Bina

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Anggaran 2024 Dikerjakan 2025, Progres Tak Jelas



Proyek Pasar Induk Banyuwangi tampak tak jelas progress pekerjaannya.

Marak Penebangan Pohon Penghijauan di Jalan PU Bojonegoro, Sekdin DLH : Tak Perlu Ijin



Pohon di jalan kabupaten desa Deru – Sumberejo aset Pemkab yang telah ditebang. (Foto: ist)



Pelindung tebing jalan DPU Desa Deru dipotong.



Kantor DLH Bojonegoro



Pohon Mahoni di jalan DPU desa Deru telah digergaji oleh Pemdes Deru.

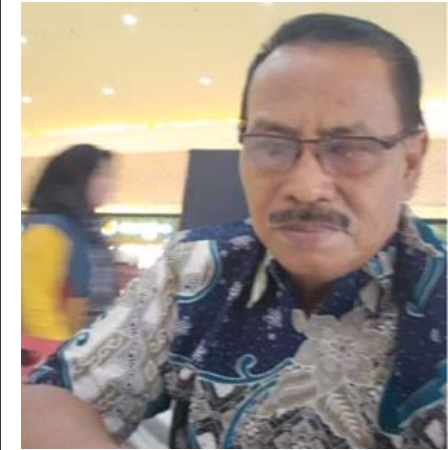
BOJONEGORO, BN – Akhir – akhir ini marak penebangan pohon penghijauan di sejumlah ruas jalan kabupaten Bojonegoro, seperti yang terjadi ruas jalan antara desa Deru dan Pekuwon Sumberejo.

Pantauan bidiknasional.com (bn.com) di lapangan, ada puluhan pohon mauni dan jati cukup besar yang ditebang. Padahal pohon pohon itu fungsinya sangat vital. Selain untuk penghijauan menjaga iklim, juga untuk penahan tebing jalan kabupaten, agar tidak longsor ke sungai sebelah timur.

Ironisnya, Pemerintah kabupaten Bojonegoro melalui Sekdin Dinas lingkungan Hidup (DLH), Beni mengatakan, pohon sepanjang jalan poros utama kecamatan (PUK) di

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

MAKI Desak KPK Segera Periksa Gubernur Jatim Khofifah



Komaryono, SH, Sekjen MAKI. (Husnan)

MOJOKERTO, BN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) suatu perkumpulan masyarakat yang membidangi penegakan hukum anti korupsi, sangat mendukung, mendesak kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil ulang gubernur Jatim Dra. Hj. Khofifah Indarparawasa. Hal ini diungkapkan Komaryono, SH, selaku Sekjen MAKI.

Menurut Komaryono, Khofifah pada saat dipanggil KPK sebagai saksi hari Jum’at 20 Juni 2025 lalu, tidak hadir dengan alasan menghadiri wisuda putranya di negri China. “Kami sangat berharap agar bu Khofifah di periksa sebagai

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

UPT Pelabuhan Perikan Pantai Pondokdadap Ikut Partisipasi Dalam Gerakan Pangan Murah di Malang



Gerakan Pangan Murah di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang diikuti UPT PPP Pondokdadap bersama IPB Puntan dan Kepanjen mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Stan ini menyediakan ikan konsumsi murah bagi masyarakat Kota Malang. (UPT PPP Pondokdadap)

MALANG, BN - Gerakan Pangan Murah kembali digelar di Kota Malang. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ini, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap bersama dengan Instalasi Perikanan Budidaya (IPB) Puntan dan Kepanjen mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan ikan konsumsi murah bagi masyarakat Kota Malang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa (17/06), dimana kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sebab, gerakan pangan murah ini menawarkan berbagai macam produk pangan mulai dari sembako serta bahan pokok lain dengan harga jual yang ada di bawah harga pasar.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Pondokdadap hadir dengan menawarkan produk ikan layang dan tuna segar yang sudah dikemas dalam kemasan vakum. Sementara, IPB Puntan dan Kepanjen hadir dengan menawarkan berbagai produk ikan air tawar beku yang sudah dibersihkan. Selain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini diantaranya: Disperindag Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan Jatim, Perum Bulog, Bernadi, Prima Freshmart, dan UMKM binaan lokal.

(Humas UPT PPP Pondokdadap/Adv)



Putuskan Pensiun, Soemantri Dirut PT DBS Berharap Dakota Tetap Bisa Berkembang

SURABAYA, BN – Hasil Rapat Umum Pemilik Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Dakota Buana Semesta (DBS) pada hari Senin, 23 Juni 2025 di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Wibawa Mukti II No.8 Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Soemantri (84), selaku Direktur Utama memutuskan pensiun dihadapan seluruh pemilik saham.

Bahwa Perseroan berencana melakukan penarikan kembali (buyback) saham dari modal yang ditempatkan dan disetor, yang dimiliki oleh pemegang saham, berdasarkan kesepakatan bersama para pemegang saham. Penarikan saham ini telah didasarkan pada hasil due diligence dan dinyatakan tidak mengganggu kondisi likuiditas Perseroan.

Informasi tersebut disampaikan Andi Syafrani SH., MCCL., CLA, dan Muhammad Nurbadrudin, SSL., SE., SH., MH., selaku kuasa hukum Soemantri berdasarkan surat kuasa Nomor 140/SK/AS&CO/VI/2025, Selasa (1/7/2025).

“Pada tanggal 23 Juni 2025 telah dilaksanakan RUPS PT Dakota Buana Semesta (DBS) yang dihadiri semua pemegang saham. Dalam rapat ini diputuskan bahwa Soemantri atau lebih akrab dipanggil Pak Mantri akan diganti sebagai Direktur Utama DBS,” ungkap Andi.

Dalam rapat membahas pengunduran diri Soemantri dari jabatan sebagai Direktur Utama dan usulan pengangkatan Fransiskus Deni Arijanto, SE. sebagai penggantinya terhitung sejak terbitnya akta perubahan hasil RUPSLB dan mengubah susunan Direksi.

“Selain itu Pak Mantri yang sudah ikut mendirikan perusahaan ini sejak awal atau beberapa dekade lalu juga memutuskan keluar sebagai pemegang saham perusahaan. Tampuk pimpinan diserahkan kepada Direktur Utama yang lama, yakni Pak Deni.

Sedangkan Komisaris masih dipegang oleh Ibu Lies,” tegasnya.

Posisi Soemantri sebagai Dirut DBS sejak awal di tahun 2024 sambungunya, dalam rangka memulihkan situasi keuangan perusahaan yang memang sedang menghadapi persoalan.

“Hingga RUPS kemarin sudah banyak usaha yang dilakukannya untuk menjaga stabilitas bisnis entitas yang sudah dikenal sebagai salah satu perusahaan logistik yang bertahan lama. Ke depan, Pak Mantri berharap Dakota akan tetap bisa berkembang dan dirinya akan menikmati masa pensiun dan kembali ke kampungnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rapat dihadiri oleh para pemegang saham seluruhnya dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga rapat memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (adv/red)



Soemantri Direktur Utama PT Dakota Buana Semesta (duduk) bersama Abdullah Maksun saat ditemui awak media di Sidoarjo, Minggu (29/6). (red)



Andi Syafrani SH., MCCL., CLA, Kuasa Hukum Soemantri. (red)

LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/Ci14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

Kepala BKD Sidoarjo Budi Basuki Kekayaannya Terus Meningkatkan



Kepala BKD Sidoarjo, Budi Basuki. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN – Kenaikan salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pindahan dari Kota Surabaya, Budi Basuki, mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan kekayaan tersebut diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam laporan tahunan-nya kepada KPK, Budi Basuki yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp5,9 miliar untuk periode pelaporan per Desember 2024. Angka ini mengalami

kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp5,2 miliar saat ia masih menjabat sebagai Asisten Administrasi Perencanaan dan Pembangunan. LHKPN Kepala BKD Sidoarjo, Budi Basuki di tahun 2023. (Foto: KPK)

Menariknya, Budi Basuki bukanlah pejabat lama di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ia merupakan ASN yang sebelumnya bertugas di Kota Surabaya sebelum dipercaya menempati posisi strategis di Pemkab Sidoarjo.

Dalam LHKPN yang disampaikan, Budi Basuki tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang terletak di Sidoarjo

dengan total nilai mencapai Rp4,6 miliar. Ia juga memiliki empat unit kendaraan dengan nilai total Rp1,02 miliar, termasuk Toyota Zenix dan Mitsubishi Xpander yang keduanya dibeli pada tahun 2024.

Aset lainnya meliputi harta bergerak senilai Rp120 juta dan kas/setara kas sebesar Rp400 juta. Ia juga melaporkan adanya utang senilai Rp176 juta, sehingga total kekayaan bersihnya mencapai Rp5,9 miliar.

LHKPN Kepala BKD Sidoarjo, Budi Basuki di tahun 2022. (Foto: KPK)

Sebagai perbandingan,

pada tahun 2023 total kekayaannya tercatat sebesar Rp5,2 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp4,7 miliar. Seluruh dokumen LHKPN tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh KPK.

KPK menegaskan bahwa kewajiban pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi.

“Setiap penyelenggara negara wajib mengumumkan kekayaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,” tulis KPK, dalam keterangan resminya. (Teddy Syah Roni)

Dugaan Jual Beli Bangku SMAN Sidoarjo, Pakar Hukum: Pelaku Bisa Dijerat UU Tipikor

SIDOARJO, BN – Dugaan praktik jual beli bangku jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Sidoarjo menuai perhatian. Isu mencuat setelah beredar kabar sejumlah kursi masuk sekolah negeri di-hargai hingga Puluhan juta.

Praktik curang tersebut diduga terjadi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Data dihimpun, Sejumlah wali murid mengaku diminta bayar sejumlah uang agar anaknya masuk di sekolah negeri favorit melalui jalur Offline.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Merdeka Surabaya, Bastianto Nugroho, menyatakan bahwa dugaan jual beli bangku sekolah bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Menurut Bastianto, aparat penegak hukum (APH), baik dari unsur kepolisian maupun kejaksaan, memiliki kewenangan penuh untuk menindak dan mengusut dugaan pelanggaran tersebut. “Polisi atau kejaksaan bisa melakukan penindakan terhadap para oknum jual beli bangku sekolah tersebut,” tegas Bastianto saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).

Ia menjelaskan, tugas utama APH adalah melakukan penegakan hukum, termasuk dalam ranah pendidikan jika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat. Langkah hukum yang dapat dilakukan, lanjut dia, dimulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap menyupai itu. “Jika benar terjadi transaksi dalam proses PPDB, maka itu bentuk penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.

Tindakan semacam itu, kata dia, tidak hanya melanggar etik, tetapi juga bisa dijerat dengan Undang-Undang



Ilustrasi oknum jual beli kursi di SMAN Sidoarjo. (Ist)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Maka jelas, pasal yang tepat untuk menjerat perbuatan itu mengacu pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Bastianto merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ia menegaskan, perbuatan yang melibatkan pembayaran uang agar diterima di sekolah negeri dapat dikategorikan sebagai bentuk suap dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang terlibat. Apalagi oknum itu merupakan seorang ASN. “Ya, karena perbuatan itu adalah penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini juga terjadi suap-menyupai,” tandasnya. (Teddy Syah Roni)

Bupati Sidoarjo Imbau Warga Jaga Kebersihan Sungai

SIDOARJO, BN – Untuk mengantisipasi banjir Bupati Sidoarjo mengajak warganya menjaga kebersihan sungai. Menyusul viralnya kondisi tepi sungai yang kumuh dan dipenuhi sampah serta tanaman liar, Bupati Sidoarjo Subandi, SH, M.Kn, bersama Kodim 0816 Sidoarjo menggelar kerja bakti massal pada Minggu (29/6/2025).

Kegiatan ini melibatkan anggota TNI, ASN, serta masyarakat sekitar di sepanjang Jalan Desa Tambak Oso dan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Kegiatan dimulai dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Subandi, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, M.Kes.

Bupati Sidoarjo Bakal Berhentikan Slamet Setiawan Sebagai Direktur Teknik Perumda Delta Tirta



Terpidana, Slamet Setiawan saat penahanan di Kejari Sidoarjo. (Teddy)

SIDOARJO, BN – Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan akan memberhentikan Slamet Setiawan dari jabatannya sebagai Direktur Teknik Perumda Delta Tirta. Hal itu beliau sampaikan saat dikonfirmasi terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo. “Pasti mas, beliaunya segera diberhentikan,” jawabnya saat

dikonfirmasi rekan media, via pesan WhatsApp.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Putu Kisnu Gupta, dalam perkara tindak pidana korupsi anggaran Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) karyawan Perumda Delta Tirta dengan terdakwa Slamet Setiawan, yang sebelumnya divonis bebas di pengadilan tingkat pertama.

Putusan kasasi bernomor 3014 K/Pid.Sus/2025 itu diputuskan pada Kamis, 15 Mei 2025, oleh majelis hakim agung yang diketuai Duwiarso Budi Santitarto, S.H., M.Hum. Amar putusan menyatakan terdakwa Slamet Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

“Majelis hakim membatalkan putusan sebelumnya dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun serta denda Rp300 juta, subsidi tiga bulan kurungan. Selain itu, majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengembalian (UP) Rp 3,9 Miliar subsidi tiga tahun penjara,” bunyi kutipan amar putusan.

Pengiriman berkas kasasi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 September 2024, menyusul rangkaian proses hukum yang telah dilalui, termasuk memori kasasi oleh JPU pada 8 Agustus 2024, dan kontra memori oleh terdakwa pada 22 Agustus 2024. Perlu diketahui, sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Ferdinand Marcus Leander SH MH membebaskan terdakwa korupsi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Diantaranya, Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012-2014, Slamet Setiawan, S.H., M.M, bendaharanya Juriyah, S.E dan Samsul Hadi bagian Pasba (Sambungan Rumah) KPRI, Kamis, 25 Juli 2024. Putusan kasasi ini menandai berakhirnya proses hukum di tingkat tertinggi dan akan menjadi dasar eksekusi pidana terhadap terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. (Teddy Syah Roni)

Diduga Serobot Lahan Warga, Developer Perumahan di Jumputrejo Sukodono Diprotes



Lokasi dugaan penyerobotan lahan milik warga. (Foto: ist/warga)

SIDOARJO, BN – Warga Dusun Beciro RT 2, Timur Tol, Kelurahan Jumputrejo, Sidoarjo, mengeluhkan dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak developer pembangunan perumahan disalah satu lingkungannya. Lahan yang diduga diserobot tersebut, menurut informasi milik keluarga bernama Sapai dan Ibu Siyam, adik kakak yang tinggal di wilayah tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, developer perumahan tersebut diduga memanfaatkan sebagian tanah milik warga untuk membangun aliran gorong-gorong tanpa seizin pemilik lahan. Aksi tersebut memicu keresahan karena tidak melalui proses komunikasi maupun persetujuan dari pemilik sah. Jadi, salah seorang Warga

meminta agar pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warganya.

“Tanah milik tetangga saya, mereka juga punya bukti kepemilikan lahan. Pajaknya juga selalu terbayar, kok bisa asal dibangun seperti itu tanpa izin,” tegas Yadi.

Warga berharap pemerintah desa maupun instansi berwenang dapat turun tangan untuk mediasi dan memastikan hak kepemilikan tanah dari warga tidak dilanggar oleh pihak manapun.

(Teddy Syah Roni)



Bupati Sidoarjo Subandi, SH, M.Kn, bersama Kodim 0816 Sidoarjo saat kerja bakti massal Minggu (29/6/2025). (yah)

Mereka turut terjun langsung membersihkan lingkungan, mulai dari memotong rumput liar, memungut sampah plastik yang menumpuk, hingga mengangkutnya ke truk sampah.

Bupati Subandi menyayangkan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan dan sungai. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Saya mengimbau kepada seluruh warga Sidoarjo, saat melintasi jalan, jangan buang sampah sembarangan. Tindakan itu berdampak buruk bagi lingkungan dan akan dirasakan

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK

NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN: Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Asep Sujana. SUMEDANG: Emawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN: Edwar Panata Muda. PURWAKARTA: Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/MAJO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG: Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Edy Suspi AB. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO: Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Rifly Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA: Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN: Handoko KEP NATUNA: Amir Hamzah. RIAU: Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Sirlani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marloe Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, OKU TIMUR : Nells Sri Wahyuni. OKI : Nurlis Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN: Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P. Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution SUMATERA BARAT : PASAMAR: Suryadarma (Kabiro), Refdinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancia (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL : Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG: Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM: Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ ADMINISTRASI/KEUANGAN: Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok C1 No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : JI. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

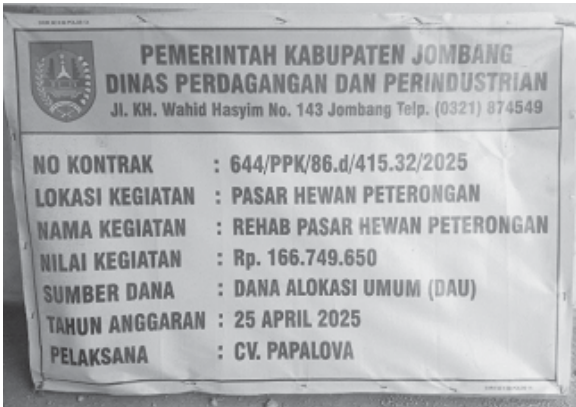
Baru Direhab, Pasar Hewan Peterongan Banyak Yang Rusak



Paving terlihat sudah rusak diduga tidak sesuai spek. (Foto: tim)

JOMBANG, BN – Proyek rehab pasar hewan Kecamatan Peterongan berupa pemasangan paving block diduga dikerjakan asal jadi, menjadi sorotan publik.

Dari pengamatan tim media Bidik Nasional (BN) Selasa (24/6) hasil pemasangan paving block di pasar hewan terlihat tidak maksimal. Di dapati banyak bagian yang mulai rusak dan bergeser padahal baru selesai dikerjakan sebulan yang lalu.



Proyek pekerjaan Rehab Pasar Hewan Peterongan yang dilaksanakan oleh CV. Papalopa, dengan anggaran senilai Rp.166.749.650,- yang bersumber dari Dana alokasi Umum (DAU) dengan No. Kontrak : 644/PPK/86.d/415.32/2025, Tahun Anggaran 2025 kini menjadi perbincangan masyarakat sekitar.

Salah satu pedagang di pasar hewan Peterongan sebut saja X mengatakan kepada tim media, jika rusaknya paving blok tersebut diduga karena kurangnya pemadatan sebelum pemasangan

paving, “Akibat itu paving rentan ambles dan bergoyang ketika ada kendaraan yang melintasinya juga terlihat dengan jelas pemasangan paving tidak rata, paving juga sudah banyak yang pecah,” ujarnya.

Menyikapi persoalan itu Totok Ketua MIO (Media Independen Online) Jombang sangat menyangkan hal itu, “Kami sangat menyangkan pembangunan paving block yang baru dikerjakan itu sudah rusak, kami menduga pemasangannya dikerjakan asal jadi tidak sesuai bestek, anggaran pemerintah jadi terbuang sia-sia,” tandasnya.

Lanjut Totok, hal itu juga patut diduga adanya unsur kesengajaan oleh pihak pelaksana proyek, “Pada prinsipnya mereka (pelaksana proyek) berencana untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kualitas dan kemanafaatannya bagi masyarakat, paving juga sudah banyak yang pecah, kuat dugaan paving bukan standar yang dibutuhkan. Kalau memakai standar k 300 tidak mungkin paving pecah,” tandasnya.

Totok juga meminta agar pengawasan dari dinas terkait harus selalu intens sehingga hasil pekerjaan itu sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditentukan dalam aturan. “Dengan fakta temuan yang ada kami berharap PPK dan PPTK segera memanggil Kontraktor tersebut dan kami meminta agar paving blok tersebut dibongkar dan dipasang lagi sesuai bestek, karena ini anggaran negara kami akan mengawal persoalan ini sampai selesai,” pungkask Totok. (tim)

Dituding Serobot Tanah Warga di Sukodono Sidoarjo, Chalidana Akui Ada Kekeliruan

SIDOARJO, BN – PT Chalidana Inti Cahaya mengakui telah melakukan kesalahan dalam pembangunan saluran air yang melibatkan sebagian tanah milik warga di Dusun Beciro, RT 2 Timur Tol, Kelurahan Jemputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pengakuan itu disampaikan langsung oleh perwakilan pihak PT Chalidana, yang menegaskan bahwa kekeliruan tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi antara staf lapangan dan staf legal.

“Kami mengakui adanya kekeliruan di lapangan. Hal ini terjadi karena staf kami dilapangan kurang berkoordinasi dengan staf legal, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana awal,” ujar Chalidana, Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut, Chalidana menjelaskan bahwa pembangunan saluran gorong-gorong sebenarnya telah mengacu pada Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). Namun, dalam praktiknya, ada kekeliruan teknis yang menyebabkan saluran justru diarahkan ke area yang bukan semestinya. “Seharusnya, pembuangan air dilakukan ke bagian belakang pondasi sesuai SKRK, bukan ke saluran kecil di samping tanah milik warga,” tambahnya.

Sebelumnya, warga setempat, khususnya keluarga Bapak Sapai dan Ibu Siyam, mengeluhkan tindakan developer



Saluran air yang melibatkan sebagian tanah milik warga. (Teddy)

yang membangun saluran air di atas lahan milik mereka tanpa izin. Lahan tersebut diketahui digunakan untuk keperluan gorong-gorong oleh pihak pengembang tanpa pemberitahuan atau kesepakatan tertulis.

Aksi sepihak dari developer ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena tidak ada proses komunikasi yang dilakukan dengan pemilik lahan.

Mas Jay, salah seorang warga setempat merasa hak atas tanah warganya dilanggar dan menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban.

“Kami minta agar pemerintah desa dan instansi berwenang segera turun tangan. Masalah ini harus diselesaikan secara adil, jangan sampai merugikan warga,” ujar Mas Jay.

Menyikapi hal ini, warga berharap ada mediasi terbuka yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah desa, pihak pengembang, dan pemilik lahan. Mereka ingin permasalahan ini menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Perlu diketahui, data dihimpun per hari ini, (3/7). PT Chalidana sudah mulai membongkar kekeliruan yang ditimbulkan oleh kesalahan Staf di Lapangan yang kurang berkoordinasi dengan Staf Legal Perusahaan. (Teddy Syah Roni)

Kader Muda PDIP Sidoarjo Beri Pesan Kritis Terhadap Ketua Baru



Endhy Budi (Kiri), Kader Muda PDIP bersama Laksamana Madya Purn, Agus Setadji (Kanan). (ist)

SIDOARJO, BN – Internal PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo mulai memanas seiring dengan pergantian pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Hari Yulianto, yang dikenal dengan sapaan Bung Ketjeng, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo, menggantikan Sumiharsono yang telah menjabat selama beberapa periode.

Pergantian ini dilakukan dalam rangka menyegarkan struktur organisasi serta mengakselerasi kinerja partai menjelang Pemilu 2029. Tak hanya ketua, posisi Plt Sekretaris DPC juga mengalami perubahan dan kini diisi oleh Bambang Riyoko, sosok organisatoris yang dinilai mampu menjembatani dinamika internal.

Respon atas pergantian ini datang dari berbagai ka-

langan kader, salah satunya dari kader muda yang dikenal vokal dan progresif, Endhy Budi. Ia menyambut rotasi tersebut dengan optimisme, namun tetap menyuarakan catatan kritis terhadap kinerja internal partai selama ini.

“Ini bukan sekadar pergantian wajah. Ini adalah alarm politik. Mesin partai harus segera digeber. Kalau tidak, kita bisa tergilas dalam arus politik nasional yang makin keras,” ujar Endhy kepada awak media, Kamis (3/7/2025)

Endhy juga memberikan apresiasi kepada Sumiharsono atas dedikasi dan pengabdianya selama memimpin DPC. Namun, ia menekankan bahwa tantangan politik ke depan membutuhkan semangat baru dan pendekatan yang lebih progresif di tubuh PDIP Sidoarjo.

“Bung Ketjeng harus tegas. Jangan biarkan PAC dan anak ranting merasa seperti penonton dalam rumahnya sendiri. Mesin partai tidak cukup dipanaskan, harus dipacu,” tegas Endhy.

Menurutnya, revitalisasi menyeluruh sangat dibutuhkan. Jika tidak, PDIP berisiko kehilangan pengaruhnya di basis tradisional, yang selama ini menjadi tumpuan kekuatan politik partai ber lambang banteng tersebut. Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian struktur partai yang lebih sibuk dengan manuver elite ketimbang menyentuh persoalan riil rakyat. “Struktur harus turun. Jangan sibuk hanya di ruang rapat. Sentuh langsung denyut nadi rakyat,” tandasnya.

Endhy menilai tahun-

tahun politik ke depan membutuhkan keberanian mengambil risiko. “Yang malas harus disingkirkan. Yang tidak solid, harus ditinggal. Ini waktunya bangkit dengan kepemimpinan baru yang siap bertarung,” pungkasnya.

Kini, perhatian publik dan kader tertuju pada langkah-langkah strategis Bung Ketjeng. Mampukah ia merangkul semua elemen partai, mengembalikan militansi kader di akar rumput, dan mencegah friksi internal yang bisa melemahkan PDIP Sidoarjo?.

(Teddy Syah Roni)

Paripurna Penetapan Kesepakatan Bersama Bupati Jombang dan Pimpinan DPRD Terkait Perubahan KUA-PPAS APBD TA 2025

JOMBANG, BN – Penetapan Kesepakatan Bersama antara Bupati Jombang dan Pimpinan DPRD adalah proses pengesahan suatu peraturan daerah atau kebijakan bersama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Maka beberapa hari lalu, DPRD Kabupaten Jombang menggelar sidang paripurna Penetapan Kesepakatan Bersama Antara Bupati Jombang dan Pimpinan DPRD terkait Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 pada hari Senin 16 Juni 2025 di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jombang.

Pada agenda rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Hadi



Bupati Bersama Ketua DPRD Jombang saat menunjukkan Nota Kesepakatan/ Kesepahaman KUA Dan PPAS Tahun 2025 (Foto: ist)

Diduga Kuat Ada Korupsi DD Pada Proyek Paving Desa Jatimlerek Plandaan



Ilustrasi

JOMBANG, BN - Dana Desa (DD) dikucurkan pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada di desa Jati Mlerek Kecamatan Plandaan, Jombang muncul adanya dugaan bahwa anggaran yang di gunakan untuk proyek paving di desa tersebut dimanfaatkan secara asal- asalan dan diduga ada penggelembungan harga. Ini ada indikasi ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan DD, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban.

Menurut sumber bidiknasional.com (bn.com) ada dugaan kuat mengarah ke mark-up pada anggaran Dana Desa tahun 2025, bahkan lebih diketahui, bahwa dalam proyek pembangunan jalan paving di salah satu desa tersebut yang berada di kawasan wilayah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sempat menjadi gunjingan warga setempat. Bahkan dugaan mark up anggaran pembangunan jalan paving ini menjadi sorotan masyarakat setempat.

Pada pembangunan jalan paving tersebut yang menjadi sorotan adalah terutama yang berada pada tiga titik, yang pertama dengan anggaran Rp 98.870.000,- dengan anggaran volumen 227 meter, yang kedua dengan anggaran Rp 89.191.000,- Dengan volume 204 meter sedang yang ketiga Rp 81.938.000,- Dengan volume 187 meter, Warga menduga anggaran tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan volume yang dikerjakan.

Selain itu menurut warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan “anggaran Rp 98.870.000,- di bangunkan dengan volume 227 meter apa tidak salah itu ? Belum lagi yang menelan anggaran Rp 89.191.000,- dengan volume 204 meter, dan yang satunya menelan anggaran Rp 81.938.000,- volume 187 meter, saya rasa itu terlalu besar mark up nya,” ungkap salah satu warga ketika memberikan info kepada bn.com sambil geleng-geleng kepala.

Selain itu juga, menurut salah satu pemborong yang berpengalaman ketika dimintai pendapat oleh bn.com mengatakan, “Paving untuk K 200 borongan per meter nya Rp 70 ribu, kalau k 300 borongan nya Rp 80 ribu sampai Rp 90 ribu. Kalau proyek pembangunan paving jalan desa biaya per meternya di atas seratus ribu itu bisa di katakan Mark up anggaran,” ujarnya.

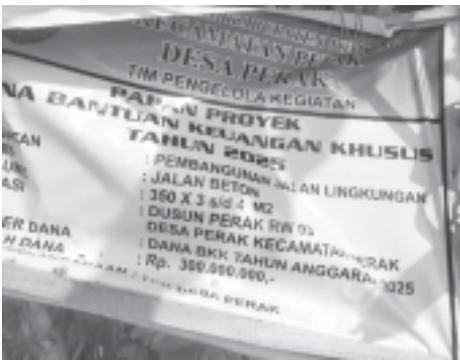
“Anggap saja Kalau k 300 per meternya menelan biaya Rp 100 ribu berarti di kalikan volume 227 meter, itu hanya menghabiskan anggaran Rp 2.270.000,-. Jadi disini bisa di katakan ada dugaan Mark up anggaran. Jangankan Rp 98 juta, Rp 40 juta pun saya berani borong,” ucap salah satu pemborong sambil tersenyum dan geleng-geleng kepalanya. Agar tidak sepihak bn.com menemui kepala desa Jati Mlerek untuk konfirmasi, namun kades menyuruh ke TPK saja. Sementara itu Agus selaku TPK mengatakan “itu sudah sesuai RAB mas,” ujarnya.

Dari hasil pantauan proyek paving tersebut ada keganjilan terkait anggaran yang di gunakan nya, diduga kuat ada kelebihan. Pertanyaan nya, kemanakah sisa anggaran tersebut ? Perlu di ketahui, harga paving K 300 kurang lebih Rp 55 ribu per meter, apakah mungkin biaya material dan ongkos pekerja per meternya mencapai Rp 300 ribu lebih.

Menurut Ketua LSM Sapujagad Rachman Alim, “ Selain adanya dugaan mark-up, kelihatan nya ada modus terkait adanya manipulasi harga barang atau jasa yang di beli oleh desa. Harga yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban diduga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Bisa saja dari selisih tinggi dari harga sebenarnya.

“Selain itu dugaan mark Untuk itu kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak dan kami dari LSM Sapujagad akan siap melaporkan ke APH agar segera turun tangan dan menindak lanjuti terkait dengan anggaran DD yang di gunakan di desa tersebut karena ada indikasi mengarah pada korupsi uang negara,” ujar Alim. (Tok)

Proyek Jalan Rabat Beton BKK Desa Perak Diduga Tidak Sesuai Spek



Papan Proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Dusun Perak, Desa Perak, Kecamatan Perak. (Foto: ist)



Bangunan jalan rabat beton Dusun Perak diduga kualitasnya buruk tidak sesuai spek. (Foto: ist)

JOMBANG, BN – Proyek desa yang tidak sesuai spesifikasi, seperti yang di soroti Bidik Nasional (BN) di Dusun Perak, Desa Perak edisi lalu terkait pengerjaan rabat beton diduga kuat dapat merugikan negara karena beberapa alasan. Kerugian ini meliputi pemborosan anggaran, kualitas proyek yang buruk dan potensi praktik korupsi yang terjadi di Desa Perak, Kabupaten Jombang tersebut.

Jika dianalisa dari keterangan sumber BN, pekerjaan proyek rabat beton di Dusun Perak, Desa Perak ditemukan adanya dugaan mark-up atau peningkatan harga yang tidak wajar. Sehingga anggaran proyek menjadi membengkak. Seperti kita lihat pada pembangunan jalan rabat beton yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2025 terkesan dikerjakan asal asalan yang penting jadi, tetapi hasil kualitas nya buruk.

Pasalnya, proyek yang bersumber dari anggaran BKK tahun 2025 senilai Rp.300.000.000,- dengan volume 360 m X 3m s/d 4 M2 yang berlokasi di Dusun Perak RW 03 tidak sesuai spesifikasi, cenderung menghasilkan bangunan atau infrastruktur yang tidak berkualitas.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Atmaja. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Anggota DPRD, Perwakilan Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Pimcab Bank Jatim, Direktur BUMD, Kabag dan Camat.

Rapat paripurna sekaligus agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Jombang Tentang Raperda RPJMD 2025-2029.

Pada rapat tersebut, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyebut Rancangan KUA – PPAS tahun anggaran 2025 yang telah disetujui menjadi KUA – PPAS tahun anggaran 2025, akan menjadi pedoman

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Pekerja Proyek Stadion Surajaya Terancam Tak Terbayar, Kadispora: Saya Dipanggil Sekda

LAMONGAN, BN - Koordinator pelaksana proyek (mandor) pembangunan Stadion Surajaya Lamongan, bertanggungjawab pada ratusan pekerja dan kini belum menerima hak pembayaran penuh dari pihak, PT Wika Karya Bangunan Gedung (Wika Gedung) selalu pelaksana. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) dipanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Dikonfirmasi sejumlah awak media, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Erwin Sulisty Pambudi, soal para mandor proyek tersebut menuntut pembayaran yang belum terselesaikan oleh kontraktor PT Wika Karya Bangunan Gedung, Erwin sapaannya, saat ini dirinya di panggil Sekretaris Daerah Lamongan. “Saya masih di Pemda, dipanggil Pak Sekda,” kata Erwin.

Erwin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari BPPW maupun PT Wika Karya.

“Kemarin juga sudah saya sampaikan ke BPPW kalau ada hal tersebut. Saya menunggu info dari BPPW atau PT WIKA Gedung, karena saya juga tidak diberi tahu. Saya tahunya juga dari media. Untuk sementara, saya hanya bisa membantu mengkomunikasikan dengan para pihak,” ujarnya.

Hala yang sama, Moch. Zamroni, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan, membenarkan adanya laporan pengaduan dari beberapa mandor proyek yang masuk ke kantornya. “Memang benar kemarin ada surat pengaduan yang masuk ke kantor kami. Itu memang haknya mereka (para pekerja) untuk menuntut haknya,” ungkap Zamroni.

Dengan harapan, imbuh Zamroni, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik melalui dialog antara para pekerja dan pihak pemberi kerja. “Saya berharap ada duduk bersama antara pemberi kerja dan para pekerja, supaya tidak terjadi wanprestasi,” pintanya.



Para pekerja saat melakukan kegiatan pembangunan Stadion Surajaya Lamongan

Terpisah, Samijan, salah satu mandor kembali mengungkapkan bahwa dirinya dan 25 mandor lainnya belum menerima pembayaran penuh atas pekerjaan mereka. Samijan, yang bertugas menyelesaikan rolling, pintu, dan pagar stadion, mengaku menghadapi tekanan besar dari para pekerjanya yang belum digaji. “Kami ditagih terus oleh pekerja. Mereka

butuh makan, biaya hidup, bahkan ada yang berutang di warung. Ini memang hak mereka,” kata dia.

Samijan menyebutkan, bahwa dalam timnya terdapat 30 pekerja, sementara mandor lain mengoordinasi hingga 50 orang. Jumlah pekerja terdampak pun diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang. Sisa pembayaran yang belum diterima Samijan dari PT Wika mencapai Rp 670 juta. Sedangkan tunggakan terhadap mandor lainnya bervariasi, mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

“Pekerjaan sudah selesai, stadion sudah diresmikan Maret lalu. Tapi sekarang hampir Juli, hak kami belum dibayar. Ini jelas dzolim,” keluh dia. “Demi membayar sebagian pekerjanya, Samijan bahkan mencoba menjual mobil pribadinya, namun hingga kini belum laku. Di sisi lain, ia juga harus menanggung cicilan bank akibat pinjaman modal kerja.

“PT Wika bilang, mereka tidak punya uang, dan baru bisa membayar pada Oktober nanti. Perusahaan besar kok bisa bilang begitu? Kami yang kecil ini dipaksa bertahan dengan tekanan dan utang,” tuturnya.

Proyek pembangunan Stadion Surajaya Lamongan yang diresmikan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025 lalu. Diketahui, Stadion berstandar FIFA dengan kapasitas 11.200 penonton ini dibangun sejak Maret 2024 dan selesai pada Februari 2025 dengan total anggaran mencapai Rp 281,36 miliar. Namun di balik kemegahan stadion baru tersebut, muncul suara keluhan dari lapisan bawah yang ikut menyukkseskan pembangunannya.

(Joko Santoso)

Kapolres Lumajang Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-79

❑ Sinergi Kuat Jaga Kamtibmas dan Demokrasi

LUMAJANG, BN – Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar, S.H., S.I.K., M.H memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Alun-Alun Lumajang pada Selasa (1/7/2025). Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri berbagai unsure Forko-pimda, jajaran TNI-Polri, OPD, serta tokoh masyarakat se-Kabupaten Lumajang.

Hadir dalam upacara tersebut Bupati Lumajang Indah Amperawati, Dandim 0821 Lumajang Letkol Inf Ronny Wijaya Koesuma, Ketua DPRD, Ketua PN Lumajang, Kalapas Kelas IIB Lumajang, sejumlah pimpinan OPD, serta camat dari seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan



tan tersebut, Kapolres AKBP Alex Sandy Siregar membacakan amanat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si, yang menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. “Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi Polri, saya

menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam menjaga kamtibmas,” ujar Kapolres saat membacakan amanat Kapolda.

Kapolda Jatim juga menyoroati keberhasilan pelak-

sanaan Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung aman dan kondusif berkat sinergitas lintas sektor. “Ini adalah bukti nyata komitmen kita dalam mengawal proses demokrasi dan menjaga kebersamaan, persatuan, serta kesatuan bangsa,” tegasnya.

Dalam sambutan itu, disampaikan pula bahwa berbagai operasi kepolisian selama setahun terakhir telah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan survey Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025, tingkat kepuasan public terhadap pemberantasan premanisme mencapai 67,4%. “Peningkatan kepercayaan public ini adalah modal utama dalam menjalankan tugas kedepan,” imbuhnya. (Son/Humas)

Pemkab Gelar Refleksi 100 Hari Kerja Bupati Pamekasan

PAMEKASAN, BN - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar acara refleksi 100 hari kerja bupati Kholilurrahman dan wakil bupati Sukriyanto Pamekasan periode 2025-2030 yang bertempat di area monumen Arek Lancor, Senin (1/7/2023) malam.

Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH, Msi dan wakil bupati Pamekasan Sukriyanto juga sekretaris daerah (sekda) Pamekasan Masrukin S.sos, Msi serta jajaran forum pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh camat serta para tokoh masyarakat kabupaten Pamekasan.

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Drs Kholilurrahman SH, Msi mengatakan kegiatan refleksi ini merupakan kegiatan wujud nyata dari beberapa program

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Refleksi 100 hari kerja bupati Kholilurrahman dan wakil bupati Sukriyanto Pamekasan periode 2025-2030 di area monumen Arek Lancor, Senin (1/7/2023) malam.

Ketua K3S Menganti, Maskuri, SPd : Soliditas Organisasi Sangat Butuh Pengorbanan Materi, Perasaan dan Harga Diri

GRESIK, BN - Akrab disapa dengan panggilan Pak Maskuri, ditemui di ruang kerjanya awal bulan Juli Tahun 2025. Dikemas dalam bincang-bincang ringan nan santai, namun sangat serius kandungan materi percakapan, dibalut nuansa kental terasa hari-hari menjelang perpisahan.

Akhir masa tugas tinggal menghitung hari, puluhan tahun mengabdikan sebagai insan pendidikan, tenaga fungsional pemerintah daerah kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur, bertanggung jawab kinerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar (SD) Negeri.

Artikel yang kesekian kalinya, membahas tentang kiprah Maskuri, S.Pd dalam ranahnya sebagai insan pendidikan, tersusun dan tersaji oleh awak media Cetak & Online Bidik Nasional. Akhir yang baik dalam usaha apapun yang lahir dari budi daya manusia adalah men-

jadi espektasi atau cita-cita utama pada umumnya, khusnul khotimah. Begitu juga, terhadap pengabdian seorang Maskuri, S.Pd, adalah tajuk dari percakapan kali ini bersama awak media Cetak & Online Bidik Nasional. Popularitas, memang pernah penulis singgung dengan mengungkapkan kepada sejawatnya, diantara ciri atau kegemaran personalitas pribadinya. Terlontar ucap sebagai umpan dan/atau motif penulis dalam menggali sedalam-dalamnya sebuah informasi.

Demi terpenuhinya unsur-unsur validasi dan faktor keberimbangan dalam penyajian kabar berita dalam ruang publik adalah syarat dasar teknis profesionalisme dalam setiap penyajian karya jurnalistik.

Ditambah dengan bumbu-bumbu hak interpretasi jurnalisem, agar memikat serta meyakinkan bagi para pembaca, sehingga terangsang rasa penasaran untuk selalu mengikuti dan senantiasa menunggu

karya-karya jurnalistik selanjutnya, tidak hanya menjadi standar keberhasilan bagi seorang penulis. Bagi para fundamentalis personal pers media, adalah kebanggaan dan kepuasan tersendiri selain karena pertaruhan ego sentris yaitu idealisme dengan konsekwensi mengorbankan financial, demi menggaet banyak pembaca atau pemirsa (mitra).

Kepribadian yang sangat berkarakter kental dan kuat sebagai seorang yang tertuntut akan kewibawaan, nampak jelas performen pada gestur dan gaya bicara Maskuri, S.Pd, figur seorang insan pendidik yang sudah barang tentu sumber ilmu pengetahuannya



Maskuri, S.Pd Kepala Sekolah / Ketua K3S Menganti, Gresik

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Aneh, Proyek Dana Desa 2024 di Kembangbahu Lamongan Belum Dikerjakan



Anggaran Dana Desa Tahun 2024 di Kembangbahu Lamongan kok Belum Dikerjakan hingga Tahun Ini

Ilustrasi tim monitoring dan evaluasi (monev) saat datang di Balaidesa

LAMONGAN, BN- Proyek Dana Desa (DD) di desa / kecamatan Kembangbahu, kabupaten Lamongan, diduga tidak dikerjakan dan anehnya Camat Kembangbahu Sutikno menyampaikan anggaran dari Dana Desa tersebut di silpakan (sisa lebih pembiayaan anggaran).

Kegiatan pekerjaan proyek Dana Desa berdasarkan keputusan musyawarah desa khusus (Musdesus). Sesuai tahapan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pertanggungjawaban.

Dana Desa disalurkan secara bertahap dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), dan selanjutnya ke RKD (Rekening Kas Desa).

Meskipun, Dana Desa (DD) tahun 2024 sudah dicairkan ke tiap-tiap rekening Desa di Kabupaten Lamongan, dari keterangan masyarakat menyebutkan, terdapat salah satu pekerjaan proyek di desa dan kecamatan Kembangbahu yang diduga belum dikerjakan hingga melangkah tahun anggaran 2025 ini, dana tersebut sempat ditarik dari Rekening Kas Desa.

Camat Kembangbahu, Sutikno, saat dimintai keterangan menyampaikan, pada intinya kami selaku pengendali ketika melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan apabila ada kegiatan yang belum dikerjakan maka untuk menyelamatkan keuangan dana desa saya rekomendasikan untuk mengembalikan ke kas desa.

Oleh karena itu, menurut dia, sampai batas akhir bulan desember belum ada kegiatan maka program tahun 2024 itu disilpakan untuk kegiatan tahun 2025, dan dalam penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2025 saya rekomendasikan apabila kegiatan dari dana silpa belum dikerjakan maka untuk penyaluran tahap 1 DD 2025 tidak saya rekomendasikan untuk disalurkan ke kas desa.

“Hingga pada bulan April - Mei kemarin ada progres pengerjaan maka DD tahap 1 baru saya rekomendasikan untuk disalurkan ke kas desa. Sedangkan, untuk alasan mengapa kok tidak dikerjakan dan sampai disilpakan tolong anda konfirmasi langsung ke desa. Perihal tersebut untuk penyampaian ke inspektorat belum, tapi sudah saya sampaikan ke dinas PMD,” ucap Camat Tikno. Rabu, 2 Juli 2025.

Disampaikan sebelumnya oleh Camat Tikno, bahwa anggaran tersebut dialihkan untuk program tahun ini dan sudah dikembalikan ke Rekening Kas Desa. “Iya, sudah masuk Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran).

“Dananya dikembalikan ke Kas Desa dan menjadi program tahun 2025 dan infonya sudah dikerjakan mas. Namun saat ditanya alasan molornya pekerjaan dan nilai anggarannya, Sutikno belum bisa menjelaskan. “Datang aja ke desa, saya gak hafal jumlahnya,” kata Camat Sutikno kepada sejumlah awak media.

Dalam hal ini, Zahri Ismanu, Kepala Desa Kembangbahu, pihaknya belum memberikan keterangan untuk memberikan respon perihal kegiatan proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2024 tersebut, meski dihubungi sejumlah awak media, hingga berita ini ditayangkan.

Data yang dihimpun, tentang lampiran peraturan Bupati (perbup) Lamongan tentang Dana Desa Tahun 2024, tercatat di Kecamatan Kembangbahu, menerima anggaran Dana Desa berkisar Rp. 15 Miliar, dan terbagi untuk 18 Desa. Sedangkan Desa Kembangbahu mendapatkan kurang lebih Rp. 750 juta. (Joko Santoso)

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Terapkan Pelayanan Berbasis Transparansi dan Peningkatan Kualitas



RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Rumah Sakit bisa mempersiapkan materi dan menghadirkan pejabat yang relevan. Ini bukan bentuk birokrasi yang menyulitkan, melainkan langkah untuk memastikan diskusi berjalan efektif.

Direktur RSUD dr. Erliyati mengatakan, pihak Rumah Sakit selalu memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum di Sumenep terutama terhadap melayani pasien untuk terus bekerja maksimal demi kemajuan pelayanan kesembuhan dengan lebih baik dan professional, metode layanan urologi RSUD Sumenep diharapkan dapat mengurangi ketergantungan rujukan ke rumah sakit di luar daerah serta meningkatkan kualitas layanan spesialis di tingkat daerah.

Lanjut Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Hj Erliyati, bahwa menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dipersiapkan adalah pembukaan layanan subspesialis urologi dan hal ini merupakan bagian dari implementasi program pemerintah yang berkaitan dengan Kesehatan Jiwa, Seksual dan Urologi serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA).

Maka dari itu segala kebutuhan telah diidentifikasi termasuk proses pengadaan tenaga dokter spesialis urologi sedang berlangsung. “Kami upayakan semua kebutuhan dasar untuk pembukaan layanan tersebut dapat segera terpenuhi. Selain sumber daya manusia, juga melakukan persiapan dari sisi sarana dan prasarana. di antaranya adalah pembangunan fasilitas ruang layanan urologi yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan teknis,” ujarnya.

“Penyiapan infrastruktur juga sedang kami laksanakan. Semuanya berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan lancar dan terealisasi tepat waktu,” tutup Direktur RSUD. (yus)

Bupati Cek Progres Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bogor

Dirancang Sebagai Pusat Layanan Haji dan Umrah



Bupati Bogor Rudy Susmanto saat meninjau Pembangunan Masjid Raya Bogor. (eml)

BOGOR, BN - Bupati Bogor Rudy Susmanto tinjau dan pantau langsung progress pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bogor yang berlokasi di area Stadion Pakansari, pada Senin (30/6/25). Ini menjadi pembuktian Pemerintah Kabupaten Bogor terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satunya melalui percepatan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bogor di kawasan Cibinong, yang kini telah mencapai progres konstruksi sebesar 12 persen hanya dalam waktu 1,5 bulan.

Bupati Bogor, Rudy Sus-

manto, menegaskan bahwa pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bogor ini dirancang sebagai pusat layanan haji dan umrah, termasuk plaza manasik, dan direncanakan memiliki asrama haji berbasis hotel syariah. Semua ini dibangun di atas lahan seluas 2,6 hektar dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.

“Masjid ini bukan sekedar rumah ibadah, tetapi akan menjadi pusat aktivitas keumatan dan layanan haji yang terpadu. Bahkan, kami tengah mengkaji penggantian ballroom dengan hotel khusus yang akan difungsikan sebagai asrama haji saat musim haji, dan hotel syariah pada bulan-bulan lain-

nya,” ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, proyek ini digerakkan tanpa seremoni peletakan batu pertama, sebagai simbol bahwa pembangunan sejati tak harus diawali seremonial, tetapi langkah nyata. “Masyarakat bertanya kapan dibangun, jawabannya sekarang. Kami tidak sibuk dengan simbolik. Kita langsung kerja, dan hasilnya bisa dilihat,” tegas Bupati Bogor.

Rudy Susmanto juga menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Raya hanya satu dari banyak program percepatan infrastruktur yang sedang digarap, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah barat, utara, selatan, hingga timur Kabupaten Bogor.

Ia menyebut, bahkan ada ruas jalan dari masa Indonesia Merdeka yang baru pertama kali akan dicor tahun ini, salah satunya di Malasari, Kecamatan Nanggung, yang akan menjadi lokasi Kejuaraan Nasional Sepeda pada Agustus 2025.

Terkait anggaran, pembangunan Masjid Raya Kabupaten Bogor ini menelan biaya sebesar Rp100 miliar,

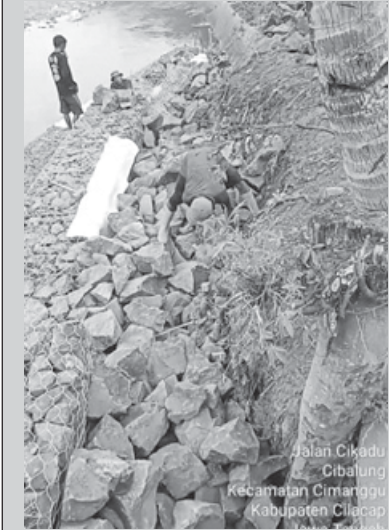
yang didanai melalui APBD dan akan diawasi secara ketat agar sesuai regulasi. Untuk tahap selanjutnya, seperti pengembangan hotel syariah, Pemkab Bogor berencana melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD agar tidak membebani keuangan daerah.

“Kami tidak sekedar membangun, tapi ingin membuat lompatan-lompatan. Kabupaten Bogor ke depan harus berubah secara nyata, bukan hanya lebih baik, tapi jauh lebih melompat,” kata Rudy

Perlu diketahui, bahwa Masjid Raya Kabupaten Bogor juga dirancang memiliki menara setinggi 96 meter yang akan menjadi ikon baru Kabupaten Bogor, memperkuat identitas religius dan arsitektural wilayah.

Tak hanya pembangunan fisik, Pemkab Bogor juga mulai merealisasikan program-program sosial seperti Sekolah Rakyat, yang akan hadir di dua lokasi yakni Jasinga dan Sukamakmur, sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pendidikan di wilayah 40 kecamatan. (eml)

Warga Desa Cibalung Antusias Sambut Pemasangan Bronjong oleh BBWS Citanduy



Pemasangan bronjong di Desa Cibalung, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap oleh BBWS Citanduy.

CILACAP, BN – Program pemasangan bronjong di Desa Cibalung, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, mendapat sambutan positif dan penuh antusias dari warga. Pekerjaan ini dinilai sangat membantu dalam menjaga keamanan permukiman warga dari ancaman erosi sungai.

Salah seorang warga yang rumahnya berada tepat di tepi Sungai Cibalung mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Dengan adanya bronjong ini, saya merasa lebih aman. Sebelumnya saya khawatir rumah tergerus air sungai, tapi sekarang sudah tenang. Terima kasih kepada pihak BBWS Citanduy, khususnya SDA OP 2 dan PPK Pak Yahya, serta pemerintah desa yang telah merealisasikan pembangunan ini,” ujarnya.

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Agus Fery, pelaksana lapangan asal Pangandaran. Ia menyatakan bahwa proses pembangunan berjalan lancar berkat kerja sama yang baik antara pelaksana dan

masyarakat. “Kami bersama masyarakat bersinergi membangun bronjong ini. Tidak lupa, pengawas dari BBWS selalu aktif memantau pekerjaan kami di lapangan,” kata Agus.

Pemerintah desa juga turut mendukung penuh proyek ini, yang merupakan bagian dari program BBWS Citanduy melalui SDA OP 2 untuk pengamanan daerah rawan erosi, khususnya yang dekat dengan permukiman warga.

Dengan terpasangnya bronjong ini, warga Desa Cibalung kini merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman abrasi sungai yang selama ini menjadi kekhawatiran utama. (Asep Sujana)

Koperasi Merah Putih Desa Kedungwuluh Siap Bangkit untuk Maju



Suasana Rapat Koperasi Merah Putih Desa Kedungwuluh. (kar)

PANGANDARAN, BN- Kebijakan pemerintah atas apa yang sudah disampaikan merupakan kebijakan yang harus dihormati dan harus segera dilaksanakan, apalagi kebijakan tersebut yang berkaitan untuk kemajuan kesejahteraan ekonomi di masyarakat.

Salah satu program nasional yang dicanangkan presiden Prabowo yaitu Koperasi Merah Putih, yang bertujuan untuk menghidupkan perekonomian di masyarakat.

Tim Bidik Nasional (BN) temui salah seorang ketua terpilih koperasi merah putih di Desa Kedungwuluh, Kabupaten Pangandaran. Hendris Andriana ketua terpilih menyampaikan harapan setelah terbentuk kepengurusan untuk solid di dalam mengemban amanah.

“Ini beban berat bagi kami pengurus kami bertekad dengan sepenuh hati untuk bisa maju di dalam rangka menghidupkan perekonomian di masyarakat khususnya baik yang menyangkut UMKM jual beli hasil bumi warung sembako pupuk pertanian ataupun yang lainnya dengan harapan kebutuhan ke semuanya bisa terpenuhi degan mudah dan terjangkau,” ungkapnya. “Dengan konsep palu gada apa yang masyarakat minta di koperasi merah putih pasti ada,” pungkasnya. (karsono)

Tanggul Sungai Diperkuat, Petani Dusun Prumpung Kini Bisa Bernafas Lega



Tanggul yang telah selesai dikerjakan.

CILACAP, BN – Tanggul Sungai Prumpung yang sebelumnya rawan jebol kini telah diperkuat dengan pemasangan bronjong. Pekerjaan ini dilaksanakan di Dusun Prumpung, Desa Serang, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, dan mendapat apresiasi besar dari masyarakat, terutama para petani.

Pemasangan bronjong tersebut direalisasikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui satuan kerja SDA OP2, dengan PPK Bapak Yahya. Pelaksana lapangan Darno sebagai tangan kanannya, Bapak Sonhaji, terus aktif di lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga hingga tuntas.

“Alhamdulillah sekarang tanggul aman,

petani bisa lebih tenang,” ujar salah seorang warga setempat. Keberadaan tanggul yang kokoh ini sangat penting, mengingat lahan pertanian di wilayah tersebut membentang luas dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Pemerintah desa dan BBWS Citanduy pun mendapat ucapan terima kasih dari warga atas kepedulian dan realisasi pembangunan ini yang dinilai tepat sasaran dan sangat dibutuhkan masyarakat. (Asep sujana)

BBWS Citanduy Luncurkan Program Perbaikan Saluran dan Sungai



BANJAR, BN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di bawah kepemimpinan Kepala Balai Eroy Koyari, melalui Satuan Kerja SDA Operasi dan Pemeliharaan (OP) 2 yang dikomandoi oleh PPK Pak Yahya dan Peltek Bu Desi, tengah melaksanakan program strategis perbaikan infrastruktur sumber daya air di wilayah kerjanya.

Program tersebut mencakup pemasangan bronjong, perbaikan saluran irigasi, serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (IPT) yang bertujuan memperkuat tebing sungai, mencegah banjir, dan melancarkan aliran air irigasi untuk kebutuhan pertanian dan pemukiman warga.

Sedikitnya 50 paket pekerjaan telah mulai direalisasikan dan tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Cilacap, serta sebagian kecil di wilayah Kab Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat, yang menaruh harapan besar agar seluruh pekerjaan bisa berjalan sesuai harapan rakyat.

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan adanya variasi dalam kualitas pelaksanaan proyek. Tidak semua kontraktor atau pemborong menunjukkan komitmen dan etika kerja yang baik. Beberapa warga menyoroti hasil pekerjaan yang dinilai kurang maksimal serta minimnya komunikasi dengan pemerintah desa.

Meski begitu, masyarakat tetap mengapresiasi langkah BBWS Citanduy dan berharap pengawasan dari pihak balai terus diperketat. Program yang digagas oleh Kepala BBWS Citanduy, Eroy Koyari ini, dinilai sebagai langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur air dan meningkatkan ketahanan lingkungan di kawasan rawan bencana. (Asep Sujana)

Proyek Bronjong di Dusun Cigatel Hampir Rampung, Warga Merasa Aman dari Ancaman Longsor

CILACAP, BN – Proyek pemasangan bronjong di Dusun Cigatel, Desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh pelaksana lapangan, Bapak Soroso, dengan progres yang berjalan sesuai rencana.

PPK SDA Operasi dan Pemeliharaan (OP) 2, Bapak Yahya, yang merealisasikan pembangunan tersebut, menyampaikan harapannya agar seluruh proses pekerjaan berjalan lancar, aman, dan kondusif hingga selesai. Ia juga berharap hasil pembangunan ini bisa bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat, menjaga infrastruktur dan keselamatan lingkungan sekitar.

Pihak BBWS Citanduy melalui PPK OP 2 terus mendorong agar setiap pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti bronjong, dilakukan secara



Pemasangan Bronjong di Dusun Cigatel. (asep)

maksimal dan tepat sasaran, demi kenyamanan serta keamanan warga di wilayah rawan bencana.

Salah seorang warga, Udin, menyampaikan rasa syukurnya atas keberadaan bronjong yang kini melindungi wilayah tempat tinggalnya. “Kami sangat berterima kasih. Sekarang lebih tenang, tidak khawatir longsor lagi kalau hujan deras,” ujar Udin.

Warga Dusun Cigatel secara umum menyampaikan apresiasi kepada pihak pelaksana serta seluruh pihak yang terlibat, termasuk BBWS dan pemerintah desa, yang telah merealisasikan program ini demi keselamatan masyarakat.

Dengan selesainya pembangunan bronjong ini, diharapkan lingkungan Dusun Cigatel semakin aman dan nyaman untuk ditinggali, serta dapat mencegah bencana alam di kemudian hari. (Asep Sujana)

Roadshow Pariwisata, Solo-Bandung Bersinergi Lewat Travel Dialog & Table Top

BANDUNG, BN – Pemerintah Kota Surakarta terus mendorong penguatan pasar wisatawan nusantara melalui sinergi lintas daerah. Salah satunya diwujudkan lewat Roadshow Pariwisata Solo: Travel Dialog & Table Top yang digelar di Royal Palm Ballroom, Hotel Aston Tropicana, Bandung, Kamis (3/7/2025).

Acara yang mengusung tema “Kekuatan Story Telling Pariwisata Kota Surakarta” ini diikuti 15 seller dari Solo, mulai dari travel agent, pengelola hotel, hingga pelaku daya tarik wisata. Mereka dipertemukan dengan 50 buyer dari Kota Bandung dalam format business-to-business (B2B).

Sekretaris Dinas Kebuda-



yaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Siti Khotimah S.Sos, MM, mewakili Kepala Dinas menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung dipilih karena menjadi salah satu pasar strategis dengan aksesibilitas yang memadai, baik jalur kereta api maupun jalan tol.

“Kolaborasi ini diharapkan memperlancar kerja sama antar daerah. Target kami mendukung tercapainya 3,7 juta kunjungan wisatawan ke Kota Surakarta pada 2025,” kata Siti. Sedang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Ir. H. Adi Junjunan Mustafa, M.Sc., juga mengapresiasi kunjungan promosi ini.

Unit Patroli Perintis Presisi Polres Tanjung Perak Ringkus Dua Pemuda Bawa Sabu

SURABAYA, BN – Patroli kewilayahan yang digencarkan setiap malam oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, guna menjaga Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) agar aman dan kondusif, berbuah hasil.

Dalam kegiatan patroli Unit Patroli Perintis Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, berhasil mengamankan dua pemuda yang secara tiba-tiba membawa barang haram seperti Narkotika jenis sabu-sabu. Dikatakan Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Iptu Suroto, kedua pemuda tersebut diamankan oleh Unit Patroli Perintis Presisi saat melakukan kegiatan patroli menghalau aksi tawuran di Jalan Tenggumung Wetan, Surabaya.

“Dari tangan keduanya didapati 3 paket narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat keseluruhan 6 gram dan sejumlah uang sebesar Rp.10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah),” kata Iptu Suroto, Kamis (03/07/2025).

Iptu Suroto juga menjelaskan, identitas dari kedua pemuda masing-masing berinisial AAR (22 th), dan AS (27 th). Keduanya merupakan warga Jalan Tenggumung Wetan, Kota Surabaya. “Penanganan terhadap kedua pemuda tersebut, sudah diserahkan ke petugas bagian Satuan Reserse Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya. (Abd. Rosi)



Dua tersangka saat di Mapolresta Tanjung Perak. (Rosi)



INFO DPRD KOTA BANDUNG

Asep Mulyadi: Peran Polri Diharap Makin Memberikan Manfaat

BANDUNG, BN - Tahun ini, peringatan HUT Bhayangkara mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, yang mencerminkan semangat pengabdian, pelayanan, dan transformasi Polri dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat. Karenanya, peran kepolisian diharapkan semakin memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya warga Kota Bandung.

DISAMPING itu, melalui momentum ulang-tahun Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025 dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi S.H., se usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa, 1 Juli 2025.

“Kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Ke-79 Bhayangkara. Mudah-mudahan peran kepolisian semakin memberikan manfaat bagi ma-

sarakat. Sehingga masyarakat semakin mencintai Polri,” katanya.

Ia menerangkan dalam mengantisipasi kerawanan keamanan di masyarakat, maka kepolisian dapat melaksanakan patroli khusus terutama di malam hari. “Terutama di malam hari, ada tempat-tempat tertentu yang sekarang ada kecenderungan meningkat dan sekarang diantisipasi,” ujarnya.

Asep Mulyadi juga berharap mendorong terus kepolisian, supaya semakin berupaya dicintai oleh masyarakat. Hari Bhayangkara



Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi S.H., Bersama Forkompinda Kota Bandung se usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa, 1 Juli 2025. (ist)

sendiri diperingati sebagai momen kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penetapan tanggal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum peringatannya.

Hari Bhayangkara, yang

juga dikenal sebagai HUT Bhayangkara, diperingati setiap tanggal 1 Juli. Pada tahun 2025, peringatan ini jatuh pada hari Selasa, 1 Juli, dan menjadi peringatan ke-79 sejak pertama kali ditetapkan.

Senada, Walikota Ban-

dung M. Farhan pun turut mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-79. “Sementara Kota Bandung tetap aman dan kondusif,” ujar Farhan.

Sesuai tema ‘Polri untuk Masyarakat’, sambungnya, menjadi ajakan untuk kita semua, bahwa menjaga

keamanan harus dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan, rangkaian peringatan HUT Bhayangkara sudah dimulai dengan doa lintas agama di seluruh Indonesia. “Melalui HUT ke-79 Bhayangkara. Kami di jajaran Polda Jabar dan Polrestaes Bandung terus berusaha menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Meskipun belum sempurna, setiap tantangan selalu kami hadapi dengan maksimal dan disertai doa,” tuturnya.

Budi mengatakan, berbagai peristiwa besar selama satu tahun terakhir di Kota Bandung mulai dari unjuk rasa, kemacetan, hingga perayaan Persib juara, semuanya bisa berjalan aman dan tertib. Hal itu berkat kerja sama seluruh pihak, termasuk Pemkot, TNI, dan tokoh masyarakat. “Termasuk kasus kejahatan jalanan dan aksi kelompok remaja yang meresahkan, kita sudah lakukan operasi bersama dan berhasil mengamankan sejumlah pelaku,” tuturnya.

“Kami juga mengundang tokoh agama untuk ikut mengedukasi anak-anak agar tidak terlibat tindakan kriminal. Sekolah dan rumah harus jadi tempat pembentukan karakter,” tambahnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan dan mendukung keamanan Kota Bandung. “Dengan semangat kebersamaan dan doa lintas agama, mari kita wujudkan Bandung yang aman, nyaman, dan kondusif untuk semuanya,” tandasnya.

(ADV/San)

PDAM Bone Fokus Perbaiki Pipa Bocor



Direktur PDAM Bone Bachtiar Sairing, S.Sos. (suspi)

BONE, BN - Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Wae Manurung Kabupaten Bone Bachtiar Sairing, S.Sos, Akan konsen Perbaikan Instalasi Yang Tidak Berfungsi khususnya dalam kota Watampone.

Kunjungan Wakil Bupati

Bone (Wabup) Andi Akmal Pasluddin didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bone, Andi Resky Pratama saat mengunjungi kantor PDAM Bone, di jalan Gunung Jaya Wijaya.

Kedatangan orang nomor dua di Pemerintahan Beramal merespon adanya informasi dari pelanggan PDAM Bone yang mengeluhkan pelayanan air ledeng yang sering macet serta kualitas air yang kurang memuaskan.

Direktur PDAM Wae Manurung Muh. Bachtiar Sairing, menjelaskan penyebab suplai air yang tidak lancar disebabkan banyaknya

pipa PDAM yang sudah tua.

Menurut Bachtiar, pipa distribusi PDAM rata – rata telah berusia lebih dari 50 tahun sehingga sering mengalami kebocoran. “Banyak pipa yang sudah tua, sehingga rawan bocor. Namun tim sudah turun kelapangan untuk memantau memperbaiki pipayang bocor,” kata Bachtiar.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan oleh warga kepada dirinya terkait persoalan distribusi air PDAM yang tidak mengalir selama sehari-hari serta bekas galian pipa bocor yang merusak jalan raya.

Wabup menekankan, agar PDAM Bone memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Bone. Sesuai arahan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bahwa kita semua harus berbenah dan

bekerja yang lebih baik.

“Saya berharap Direktur PDAM Wae Manurung dapat memberikan perubahan dan inovasi demi pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan PDAM,” harap A.Akmal.

Menurut A.Akmal, Pemda tentunya menaruh perhatian serius terhadap layanan air bersih yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Pemda Bone berharap, agar layanan air bersih dapat ditingkatkan dan PDAM mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat serta daerah Bone.

PDAM harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi daerah. “Saya berharap direktur PDAM mampu memimpin perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan layanan yang optimal,” tutup A.Akmal. (suspi)

Perjuangkan Pembangunan Daerah Terisolir, Pemkab Pesibar Jemput Bola Ke Pemerintah Pusat

PESISIR BARAT, BN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) terus mendorong upaya peningkatan pembangunan hingga ke tingkat pekon dengan gencar melakukan jemput bola hingga ke pemerintah pusat. Kali ini dengan dipimpin langsung oleh Bupati, Dedi Irawan, didampingi Pj. Sekda, Tedi Dadmiko, S.KM., S.H., M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Septono, S.KM., M.M., berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Selasa (1/7/2025).

Kunjungan orang nomor satu di Pesibar tersebut disambut langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs. Samsul Widodo, M.A. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo-tiksan setempat, Suryadi, diruang kerjanya, Rabu 2/7/2025.

Dalam kesempatan itu, menurut Suryadi, Bupati, Dedi Irawan menyampaikan bahwa, Pesibar merupakan kabupaten paling bungsu di Provinsi Lampung yang pada dasarnya masih membutuhkan banyak sentuhan pembangunan diberbagai sektor hingga ditingkat pekon. “Di Pesibar masih ada pekon yang tidak hanya tertinggal, namun terisolir yaitu Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Siring Gading, dan Way Tiyas Kecamatan Bangkunt yang belakangan ini seringkali viral di berbagai platform media sosial dan pekon-pekon lain di wilayah Pesibar,”



Bupati Pesibar, Dedi Irawan beserta sejumlah Pejabat yang mendampingi saat sowan ke Kementerian Desa PDTT, Selasa 2/7/2025 (Diskominfotiksan Pesibar)

ungkap Bupati, Dedi Irawan.

Karenanya, menurut keterangan Suryadi, Bupati, Dedi Irawan berharap agar Kemendes-PDTT melalui Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat mengalokasikan anggaran pembangunan melalui berbagai programnya dalam rangka mendukung upaya Pemkab Pesibar meningkatkan pembangunan hingga di tingkat pekon, tak terkecuali empat pekon di Way Haru dan pekon-pekon lainnya di Pesibar.

“Terlebih saat ini Pemkab Pesibar bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) secara intensif tengah berupaya mewujudkan membuka keterisolan Way Haru. Tentunya kedepannya Pemkab Pesibar berharap agar Pesibar juga bisa mendapat dorongan dari Ditjen. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam rangka memberikan pembangunan yang merata,” harap Dedi Irawan seperti yang dituturkan Suryadi.

Sementara dalam kesempatan itu Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo menanggapi dengan menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Pemkab Pesibar dalam rangka peningkatan pembangunan hingga di tingkat pekon. “Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tentu mendukung langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Bupati Pesibar bersama jajarannya. Namun demikian, hal tersebut tentu akan dilakukan kajian, verifikasi, dan penyelesaian dengan program prioritas pemerintah pusat,” ujar Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, tutup Suryadi. (TAUFIK)

Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang Soal Rancangan Perubahan APBD 2025



KAB.MALANG, BN – Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan komitmen dalam menciptakan tata kelola anggaran yang akuntabel dan berpihak pada rakyat. Maka DPRD Kabupaten Malang melangsungkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupati Malang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang dan jawaban atas pandangan fraksi DPRD terkait rancangan perda, perubahan APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran konstruktif dari seluruh fraksi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran berbasis kinerja dan dampak nyata di lapangan.

“Kami sepakat bahwa perubahan APBD harus mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai prinsip performance-based budgeting. Ini sejalan dengan amanat PP No. 12 Tahun 2019,” tegasnya.

Bupati Malang saat penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (1/7).

Bupati mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah dalam R-APBD 2025 turun menjadi Rp 4,82 triliun, atau menurun 0,68% dari APBD induk. Penurunan terjadi akibat pemotongan DAU dan DAK dari pemerintah pusat, meski sebagian tertutupi oleh naiknya bantuan keuangan provinsi.

Sebaliknya, belanja daerah justru meningkat sebesar Rp 112 miliar, menjadi total Rp 5,13 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh SILPA 2024 dan penyesuaian Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengembalian dana BKK dan Dana BOSP ke kas pemerintah pusat dan provinsi.

“Sebagian dari BTT juga dialokasikan untuk program strategis seperti pembentukan koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan,” kata Bupati.

Pemkab Malang mencatat realisasi PAD 2024 sebesar Rp926,8 miliar atau 89,16% dari target – naik 10,48% dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator positif bagi kemandirian fiskal daerah. Untuk mendukung optimalisasi PAD, Satpol PP telah melaksanakan 30 kegiatan penegakan Perda selama Januari-Mei 2025, termasuk penertiban reklame, pengawasan perizinan, dan sidang tipiring.

“Upaya ini akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat basis pendapatan daerah,” ujar Bupati. Dari sisi pembiayaan, Pemkab mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 315 miliar dan pengeluaran Rp 10 miliar, menghasilkan pembiayaan netto Rp305 miliar. Dana ini diarahkan untuk kegiatan yang peruntukannya telah ditentukan seperti DAK, DBHCHT, dan belanja prioritas wajib, termasuk pendidikan dan infrastruktur.

Dalam infrastruktur, Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan revisi terakhir, panjang jalan kabupaten kini mencapai 1.641,62 km. Pemkab akan terus mendorong pembangunan jalan berkualitas untuk memperlancar akses dan pertumbuhan ekonomi.

Bupati juga membuka peluang pemanfaatan pembiayaan kreatif seperti obligasi daerah dan sukuk daerah, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022, guna mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Di akhir sambutan, Bupati Malang menyampaikan bahwa pembahasan teknis R-APBD 2025 akan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara menyeluruh.

“Sinergi ini bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan. Kita ingin kebijakan anggaran ini menyentuh langsung masyarakat dan menjadi jawaban atas kebutuhan riil warga Kabupaten Malang,” tutup Bupati. Rapat paripurna tersebut menjadi tonggak penting dalam mempertegas arah pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan rakyat, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Adapun jawaban tersebut pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang ini dibacakan sebelumnya oleh juru bicara DPRD, Fakhri Islam, dari Fraksi Golkar, “mengenai salah satu fokus yang dibahas dalam rancangan perubahan APBD 2025 ini, terkait penggeseran anggaran antar program, kegiatan dan jenis belanja, semua OPD. DPRD Kabupaten Malang meminta agar eksekutif tetap konsisten dengan tema dan prioritas pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Malang tahun 2025, beserta target-target pembangunan di dalamnya. Secara khusus, DPRD Kabupaten Malang meminta agar program dan kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025 nantinya benar-benar mempertimbangkan dengan cermat, adanya keterbatasan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun berjalan”, tandasnya. (ADV/NN)

HUT Kota Pagar Alam Ke 24, DPRD Gelar Sidang Istimewa Paripurna Ke 10

PAGARALAM , BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam melaksanakan sidang istimewa paripurna ke 10 dalam rangka hari jadi Kota Pagar Alam yang 24 tahun, dengan Tema Bekerjalah dengan Hati.

Sidang paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pagar Alam yang di pimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di dampingi Unsur pimpinan serta seluruh Anggota DPRD Kota Pagar Alam Senin (23 Juni 2025).

Mengawali sambutan nya Ketua DPRD Hj JenniShandiyah, menyampaikan Alhamdulillah Kota pagaram dengan adanya bukti sistem pengelolaan Keuangan Daerah, dan baik dalam pelayanan Publik sehingga mendapatkan WTP dari BPK, selanjutnya untuk menunjang dan melanjutkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Ludi Oliansyah dan Hj Bertha, kita perlu bersama-sama bekerja dengan hati sesuai dengan arahan dan program Fuburnur sumatra selatan menindaklanjuti instruksi

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pagar Alam berfoto bersama.

Presiden RI Prabuwo Subianto. “Tema kita pada ulang tahun ke 24 tahun 2025 ini adalah Bekerjalah Dengan Hati,” ucap Jenni.

Di tempat yang sama Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah mengatakan, “Umur 24 merupakan umur yang menginjak Dewasa dan rentan dalam menghadapi kehidupan dan di usia ke 24 tahun Kota Pagar Alam ini mari bersama sama kita bahu membahu dalam melakukan pekerjaan dan tugas kita dengan Tukus dan Ihlas dengan hati untuk memajukan Kota Pagar Alam agar semakin maju dan berkembang terus hingga menumbus Manca Negara,” kata Walikota.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, capaian seratus hari kerja Walikota sudah terlihat dan teruslah berprestasi, sementara selama ini sudah banyak sekali di raih Kota Pagar Alam sejak berdiri hingga berusia



Sidang Istimewa Paripurna Ke 10 DPRD Kota Pagar Alam.

ke 24 tahun ini ini semua berkat kerja sama Walikota dan Wakil Walikota anggota DPRD serta masyarakat yang selalu bekerja sama dalam memajukan Kota Pagar Alam.

Dirinya mengapresiasi atas sinergi dan Kolaborasi, Koordinasi, kebersamaan, kekompakan selama ini terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Pagar Alam.

Lanjut Gubernur H Herman Deru, Kota Pagaram ada Aset Wisata yang hatus kita pertahankan dan kita jaga, terutama Ke Arian Lokal yang wajib kita jaga dan pertahankan, kemajuan untuk berkolaborasi dengan tidak meninggalkan ke arian lokal.” kata Gubernur.

“Dihari Jadi Kota Pagaram ke 24 ini dan dalam Sidang istimewa paripurna ke 10 DPRD pagaram, Gubernur Berikan bantuan yang sudah dibawakan langsung SK nya uang Rp 35 miliar untuk tahap awal selanjutnya silakan Walikota dan DPRD buat program dan usulan. “Nanti kita tambah lagi,” katanya.

Hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa ke 10 DPRD Kota Pagaram,Stap Ahli utusan Pangdam sriwijaya,ketua PKK provensi, wakil walikota Prabumulih, kepala Dinas Pariwisata provensi, Wakil Bupati Lahat Widya Ningsih, wakil Bupati Banyuasin, wakil Bupati Muara enim, dandim 0405 Lahat, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama, Forkopimda, Ormas, dan instansi Vertikal. (Adv/Leo)

jahteraan masyarakat Kota Pagar Alam, marilah kita sejenak merenungkan dari hati yang paling dalam, mari kita tanamkan rasa cinta dan rasa memiliki kota yang penuh dengan perjuangan ini,” ungkap Wali Kota.

Upacara ini berlangsung dengan khidmat, dengan diikuti oleh Forkopimda Kota Pagar Alam, Ketua TP PKK Kota Pagar Alam, Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, Instansi Vertikal, Veteran, TNI, Polri, Persit, Bha-yangkari, BUMN, BUMD, Seluruh ASN, RW, RT, Kerabat Pecinta Alam (KPA) dan Siswa-siswi SD dan SMP di Kota Pagar Alam. (Leo)



Momen HUT Kota Pagar Alam ke-24, Walikota Louching 2 Program Unggulan



Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah berfoto bersama saat Louching 2 Program Unggulan. (leo)

PAGAR ALAM, BN- Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-24, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah bertindak sebagai Inspektur Upacara, yang dilaksanakan di Lapangan Eks. MTQ Gunung Gare, Kota Pagar Alam, pada Sabtu pagi (21/06/2025).

Pada momen istimewa tersebut, Wali Kota Ludi Oliansyah melaunching dua

program unggulan yang merupakan janji politiknya bersama Wakil Wali Kota Hj Bertha, yakni pemberian bantuan Fasilitas Sekolah Gratis (baju seragam, buku dan sepatu) untuk pelajar di Kota Pagar Alam, serta bantuan Ambulance Gratis di setiap Kelurahan di Kota Pagar Alam.

Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut Wali Kota Ludi Oliansyah juga meng-

instruksikan untuk segera mencairkan insentif RT/RW dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh ASN di Kota Pagar Alam, yang telah dinaikkan dari tahun sebelumnya.

“Sebagai gantinya, saya menuntut kinerja dan dedikasi bapak dan ibu dalam bekerja untuk pemerintah Kota Paga Alam, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan hati,” pesan Wali Kota.

Dalam momen bersejarah ini, Wali Kota Ludi Oliansyah juga mengajak seluruh peserta upacara untuk kembali mengingat perjuangan para pendiri hingga terbentuknya Kota Pagar Alam.

“Sesuai dengan cita-cita pembangunan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kese-

jahteraan masyarakat Kota Pagar Alam, marilah kita sejenak merenungkan dari hati yang paling dalam, mari kita tanamkan rasa cinta dan rasa memiliki kota yang penuh dengan perjuangan ini,” ungkap Wali Kota.

Upacara ini berlangsung dengan khidmat, dengan diikuti oleh Forkopimda Kota Pagar Alam, Ketua TP PKK Kota Pagar Alam, Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, Instansi Vertikal, Veteran, TNI, Polri, Persit, Bha-yangkari, BUMN, BUMD, Seluruh ASN, RW, RT, Kerabat Pecinta Alam (KPA) dan Siswa-siswi SD dan SMP di Kota Pagar Alam. (Leo)

Bupati Asahan Imbau Warga Kurang Mampu Segera Daftar BPJS Kesehatan Gratis



Bupati Asahan, Taufik Zaibal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si. (tp)

ASAHAN, BN- Bupati Asahan, Taufik Zaibal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si mengimbau kepada warga kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan secara gratis.

Imbauan ini disampaikan oleh Bupati Asahan saat

“Silahkan warga yang sesuai syarat, laporkan diri ke kantor Camat dan Lurah agar warga memiliki jaminan Kesehatan,” demikian ucap Bupati Asahan.

Bupati Asahan yang juga didampingi Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP menjelaskan hal ini dilakukan agar warga terjamin

penyerahaan BPJS Kesehatan gratis kepada masyarakat di halaman kantor Camat Kisaran Barat pada Selasa (24/06/2025). Dalam sambutannya Bupati mengatakan,

“Silahkan warga yang sesuai syarat, laporkan diri ke kantor Camat dan Lurah agar warga memiliki jaminan Kesehatan,” demikian ucap Bupati Asahan.

Bupati Asahan yang juga didampingi Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP menjelaskan hal ini dilakukan agar warga terjamin

upaya memberikan pelayanan terbaik, terutama di bidang kesehatan.

Sebagai bentuk langkah nyata Pemkab Asahan sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2025 telah diaktifkan sebanyak 21.592 peserta BPJS Kesehatan gratis yang didanai dari APBD Kabupaten Asahan yang di tujukan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Bupati menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Asahan untuk mewujudkan universal health coverage (UHC) dan percepatan penurunan stuting serta program Indonesia Pintar di tahun 2025. (T.P)

Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar Merasa Kehilangan Dengan sosok Sayono

MANGGAR, BN – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kehilangan sosok pegawai yang menjadi teladan dan pengayom bagi sesama PNS dan orang di sekitarnya. Sang pejabat rendah hati dan tak pernah emosi itu memasuki masa purna tugasnya, usai 40 tahun mengabdikan.

Sayono (60), merupakan pejabat panutan dan ‘bapak’ bagi banyak kalangan pegawai Pemkab Beltim. Saat acara Silaturahmi dan ramah tamah menjelang Purna Tugas Sayono di Lobi Sekretariat Daerah, Senin (30/6/25) Kemarin, tidak sedikit pegawai yang menitikkan air matanya melepas kepergian Sayono.



Sayono (tengah) bersama bupati dan wabup Beltim. (ist)

Begitu halnya dengan Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar yang merasa kehilangan dengan sosok Sayono. Mengingat mereka sangat dekat, satu angkatan PNS dan sama-sama pernah menjadi Camat. “Kami melamar PNS di tahun 1984 dan sama-sama diterima di tahun 1985. Sejak itu hubungan saya dengan beliau tidak pernah putus,” ungkap Khairil.

Bagi Khairil, kepribadian Mantan Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah itu agak berbeda dengannya, khususnya dari segi kesabaran. Bahkan sejak mengenal Sayono, tidak pernah sekalipun ia melihat atau mendengarnya marah. “Haji Sayono adalah seorang pria yang sangat baik dan perlu dicontoh. Menjadi seorang panutan, betul-betul penyabar dan dewasa, tidak pernah sekalipun melihat beliau marah sampai hari ini,” beber Khairil.

Namun meski begitu, Khairil punya banyak kesamaan dengan Sayono, utamanya saat memberikan pelayanan dengan masyarakat. Apalagi sesama pegawai kantor camat dan sama-sama pernah menjadi camat, mereka selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

“Apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sampai sekarang prinsip itu masih kami pegang. Itu yang kita harap akan jadi suri tauladan bagi rekan-rekan ASN lainnya terutama yang masih muda,” harap Khairil.

Kekaguman yang sama terhadap Sayono, juga diungkapkan oleh Bupati Beltim, Kamarudin Muten. Bahkan menurutnya sudah menyukai sosok Sayono sejak menjabat sebagai Camat Kelapa Kampit, 2011 silam. Kala itu, Afa menjadi pengusaha sekaligus warga Kecamatan Kelapa Kampit.

“Jujur dari dulu saya sudah suka dengan beliau, pas jadi Camat. Orangnya selow (penuh ketenangan-red) dan tidak pernah emosi. Sangat baik,” kenang Afa sapaan Kamarudin. (diskominfobeltim/as)

Bupati Asahan Jemput 2 Jemaah Haji yang Sakit

ASAHAN, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menjemput 2 jemaah haji asal Kabupaten Asahan yang tiba lebih dulu dari jemaah lainnya di embarkasi Medan, hal ini dilakukan karena alasan kondisi kesehatan dari kedua jemaah haji tersebut. Adapun jemaah haji yang dijemput adalah Zaitun Adam, (65) yang sedang sakit dan didampingi oleh suaminya M. Jen Sinaga, (74).

Bupati Asahan menjelaskan penjemputan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakatnya yang telah menjalankan ibadah haji, terutama bagi Zaitun Adam yang sedang sakit dan membutuhkan perhatian khusus. “Ini bentuk komitmen pemerintah Asahan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan para jemaah haji,” ucap Bupati pada Sabtu (28/06/2025).



Bupati Asahan Jemput 2 Jemaah Haji yang Sakit di Embarkasi Medan

Bupati Asahan juga menyambut hangat kedatangan jemaah haji dan mengucapkan selamat atas pelaksanaan ibadah haji yang telah dijalankan. “Saya berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat Asahan,” kata Bupati Asahan.

Dalam penjemputan, Bupati Asahan didampingi beberapa pejabat, termasuk Kabag Umum Setdakab Asahan, Kabag Kesejahteraan Sosial Setdakab Asahan, Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, kasi Umroh dan Haji Kemenag, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh dr. Deni Mahesa Purbha.

Setelah dijemput, ke-dua jemaah haji langsung diantar pihak Pemkab Asahan ke rumah beralamat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, kabupaten Asahan. (T.P)

Bupati Asahan Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1447 H Kemenag

ASAHAN, BN - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Asahan menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H yang bertema “Damai Bersama Manusia dan Alam” di halaman MAN Asahan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Kajari Asahan, mewakili Kapolres Asahan, Kakankemenag Kabupaten Asahan, Camat Kota Kisaran Timur, Lurah Kisaran Naga, Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, Ketua Imtaq Kabupaten Asahan, jajaran Kemenag Kabupaten Asahan, ibu-ibu Majelis Taklim, dan tamu undangan lainnya.



Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar saat Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1447 H di Kemenag. (TP)

Dalam rangkaian acara, Kakankemenag Kabupaten Asahan H. Abdul Manan, MA, melantik Kelompok Kerja Penyuluh Kemenag Kabupaten Asahan Tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud keseriusan Kemenag bersama para penyuluh agama dalam menyemarakkan momen tahun baru Islam sebagai ajang pembinaan mental umat.

“Momen ini harus menjadi ajang refleksi diri dan pembinaan mental spiritual umat. Kami siap mendukung pembangunan di bidang keagamaan dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan. Ia juga menyampaikan tekad untuk membangkitkan kembali peran Majelis Taklim sebagai pilar dakwah dan pembinaan umat di Asahan,” ungkapnya.

Sebelum menyampaikan bimbingan dan arahannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Agus Supono, yang berhasil meraih Juara I Penyuluh Agama Islam Award Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dalam bidang Moderasi Beragama. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif penyuluh agama dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran di tengah masyarakat. (T.P)

Bupati Pinrang Serahkan Santunan Anak Yatim

PINRANG, BN- Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid, S.Sos secara langsung menyerahkan bantuan santunan kepada anak-anak yatim penghuni Panti Asuhan Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah serta kepada para hafidz dan hafidzah yang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Panti Asuhan Aisyiyah, Kamis (3/7/2025)

Santunan ini merupakan hasil inisiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang yang dikemas dalam program Lebaran Yatim, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak yatim, para penghafal Al-Qur'an serta santri berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, program ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah yang sejalan dengan program - program Baznas yang senantiasa menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan ini bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari komitmen kita untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak yatim dan para hafidz yang telah memberikan kebanggaan bagi Kabupaten Pinrang,” ujar



Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim penghuni Panti Asuhan Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah. (ist)

Baznas Kabupaten Pinrang yang selama ini telah menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap Baznas terus melakukan evaluasi terhadap program-programnya agar semakin tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi kemiskinan ekstrem. Harus ada sinergi antara Baznas dan program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan,” ungkap Bupati Irwan.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Pinrang, H. Muh. Taiyyeb, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Lebaran Yatim merupakan bagian dari tanggung jawab Baznas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. (*sbr)

Bupati Pinrang Lepas Pawai Ta’aruf Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

PINRANG, BN - Suasana Pagi hari yang mendukung tapi cerah menyambut Tahun baru ISLAM 1447 Hijriah, disertai angin lembut yang nyaman menyelimuti ratusan rombongan peserta Pawai Ta’aruf memenuhi kawasan Lasinrang Park, hari Jum’at (27/6). Para peserta ini berdatangan dari segala penjuru kota Pinrang yang berasal dari berbagai Instansi sekolah Negeri maupun Swasta pada semua tingkatan, di hadapan para peserta Pawai ini tampak Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos secara resmi melepas ribuan peserta Pawai Ta’aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang penuh semangat.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Dewan Pimpinan Daerah Badan Koordinasi



Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat melepas ribuan peserta Pawai Ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.

Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Pinrang, yang dirangkaikan dengan peluncuran Gerakan Memakmurkan Masjid sebagai salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

Pada kegiatan tahunan ini berlangsung sangat meriah dan Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Pinrang, Rusli Rasyid menyampaikan dalam laporannya bahwa jumlah peserta pawai Ta, aruf

kali ini diperkirakan mencapai 10 ribu orang.

Peserta berasal dari berbagai tingkatan pendidikan antara lain TK TPA, PAUD, SD, SMP, SMA, serta perwakilan dari organisasi wanita, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan lainnya.

Di depan semua barisan peserta pawai, Bupati Irwan berdiri menyampaikan sambutan lapornya bahwa betapa pentingnya momentum Tahun

Bupati Irwan.

Kegiatan ini juga dikaikkan dengan momentum peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian bersama.

Menurut Bupati Irwan, semangat berbagi dan membahagiakan anak-anak yatim serta para penghafal Qur'an harus menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Pinrang.

Lebih lanjut, Bupati Irwan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada

Baru Islam kali ini sebagai waktu untuk refleksi dan hijrah menuju hal yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momen tahun baru hijriah ini untuk hijrah dari hal-hal yang kurang baik ke arah yang kehidupan lebih baik lagi, sebagaimana kondisi hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW,” ungkap Bupati Irwan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, Ketua TP PKK Hj. A. Sri Widiyati A. Irwan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang H. Irfan Daming, para staf ahli Bupati, para Asisten, kepala OPD, serta jajaran tokoh ormas keagamaan, kepemudaan, dan organisasi wanita. (*sbr)

PAD OKI Tak Capai Separuh Target, Fraksi Gerindra Minta Pemkab Lebih Realistis

OKI, BN - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan agenda penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diwarnai dengan pemaparan resmi dari Wakil Bupati Supriyanto serta evaluasi mendalam dari Fraksi Gerindra terhadap kinerja pendapatan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati OKI Supriyanto menyampaikan bahwa pihak eksekutif telah menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Ia menjelaskan bahwa opini BPK atas laporan keuangan Pemkab OKI Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) — opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Ini merupakan WTP ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011.

“Kita pertahankan capaian ini di tahun-tahun berikutnya. Ini hasil kerja keras SKPD yang terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPRD yang terhormat,” ujar Supriyanto senin (23/6/2025).

Namun, di balik raihan WTP tersebut, angka-angka dalam laporan keuangan menunjukkan realitas yang perlu jadi catatan. Wakil Bupati mengungkapkan bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3 triliun, namun hanya terealisasi sekitar Rp2 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp907 miliar, hanya terealisasi Rp291 miliar atau 32,9%.

Merespons hal ini, Feri Indratno dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa capaian PAD yang bahkan tidak menyentuh 50% sangat mengecewakan dan harus menjadi perhatian serius, terutama bagi pimpinan daerah yang baru.

“Bapak Wakil Bupati perlu menjadikan ini catatan kami. Kita lihat di sini, PAD diproyeksikan Rp907 miliar tapi hanya terealisasi Rp291 miliar. Ini hanya 32%, sangat tidak memuaskan,” kata Feri. (Nurtis)



Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). (nurtis)

TK Negeri Pembina Pinrang Meriahkan Pelepasan Siswa Lewat “Fun Walk with Family”



Pelepasan peserta didik TK Negeri Pembina tahun ajaran 2024-2025 di halaman Masjid Agung Al Munawwir, Kabupaten Pinrang, Sabtu (14/6/2025).

TK Pembina Pinrang, Sebagai Ketua Panitia acara ini Ibu Misionaris S. Pd, dengan penuh semangat dan antusiasnya mensukseskan Acara ini, Ifend ini diikuti sekitar 150 anak didik, yang didampingi oleh para orang tua dan guru. Dengan tema “Satu Langkahmu Menentukan Masa Depanmu”, kegiatan ini menjadi momen penuh makna sekaligus perpisahan hangat antara peserta didik dengan para guru yang telah membimbing mereka selama ini.

Kegiatan dibuka dan dipandu dengan semangat oleh Ibu Mariana, S.Pd., Gr., yang berhasil membangun antusiasme seluruh peserta, terutama anak-anak yang terlihat sangat menikmati rangkaian acara.

Ibu Andi Deliana tampil pula sebagai yang mewakili Orang Tua Murid dirinya menyampaikan terimakasihnya kepada segenap para Guru TK Pembina khususnya kepala sekolah yang selama ini mendidik serta membimbing anak - anak kami dengan baik sekali di sertai dedikasi yang tulus, moment seperti ini di lakukan sebagai Implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat yakni “ Berolah Raga, Bermasyarakat, Rasa Kebersamaan, Giat belajar, berakhlak, sopan santun dan sebagainya, dirinya merasa bersyukur kegiatan ini terlaksana dengan baik dan pelepasan peserta didik yang telah selesai menjalani pendidikan selama setahun sejak ajaran 2024 - 2025 dan suksesnya acara ini tentu adanya dukungan dan sinergitas berbagai pihak mulai Orang Tua Murid, atau Ayah Bunda dan rekan - rekan Guru dan pihak terkait lainnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan jalan santai keluarga, di mana anak-anak TK berjalan bersama orang tua dan guru menyusuri rute yang telah ditentukan berjarak 1 kilo meter jarak tempuh di pagi hari, sembari menikmati kebersamaan. Setelahnya, anak-anak menampilkan pentas lagu anak-anak sebagai bentuk apresiasi untuk para guru tercinta.

Suasana semakin meriah dengan adanya pencabutan undian berhadiah yang ditujukan untuk kelompok peserta. Aneka souvenir menarik dibagikan sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas partisipasi mereka. (*sbr)

PINRANG, BN- Suasana penuh keceriaan menyelimuti halaman Masjid Agung Al Munawwir, Kabupaten Pinrang, Sabtu (14/6/2025). Ratusan peserta berkumpul dalam kegiatan bertajuk “Fun Walk with Family” yang digelar oleh TK Negeri Pembina Pinrang dalam rangka pelepasan peserta didik tahun ajaran 2024-2025.

Acara ini dipimpin oleh Kasmianti Syafar S. Pd dan sekaligus sebagai Kepala TK Pembina Pinrang, Sebagai Ketua Panitia acara ini Ibu Misionaris S. Pd, dengan penuh semangat dan antusiasnya mensukseskan Acara ini, Ifend ini diikuti sekitar 150 anak didik, yang didampingi oleh para orang tua dan guru. Dengan tema “Satu Langkahmu Menentukan Masa Depanmu”, kegiatan ini menjadi momen penuh makna sekaligus perpisahan hangat antara peserta didik dengan para guru yang telah membimbing mereka selama ini.

Kegiatan dibuka dan dipandu dengan semangat oleh Ibu Mariana, S.Pd., Gr., yang berhasil membangun antusiasme seluruh peserta, terutama anak-anak yang terlihat sangat menikmati rangkaian acara.

Ibu Andi Deliana tampil pula sebagai yang mewakili Orang Tua Murid dirinya menyampaikan terimakasihnya kepada segenap para Guru TK Pembina khususnya kepala sekolah yang selama ini mendidik serta membimbing anak - anak kami dengan baik sekali di sertai dedikasi yang tulus, moment seperti ini di lakukan sebagai Implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat yakni “ Berolah Raga, Bermasyarakat, Rasa Kebersamaan, Giat belajar, berakhlak, sopan santun dan sebagainya, dirinya merasa bersyukur kegiatan ini terlaksana dengan baik dan pelepasan peserta didik yang telah selesai menjalani pendidikan selama setahun sejak ajaran 2024 - 2025 dan suksesnya acara ini tentu adanya dukungan dan sinergitas berbagai pihak mulai Orang Tua Murid, atau Ayah Bunda dan rekan - rekan Guru dan pihak terkait lainnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan jalan santai keluarga, di mana anak-anak TK berjalan bersama orang tua dan guru menyusuri rute yang telah ditentukan berjarak 1 kilo meter jarak tempuh di pagi hari, sembari menikmati kebersamaan. Setelahnya, anak-anak menampilkan pentas lagu anak-anak sebagai bentuk apresiasi untuk para guru tercinta.

Suasana semakin meriah dengan adanya pencabutan undian berhadiah yang ditujukan untuk kelompok peserta. Aneka souvenir menarik dibagikan sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas partisipasi mereka. (*sbr)

Peringati Hari Keluarga, Bupati Beltim Lepas Kirab Bangsa Kencana

MANGGAR, BN-Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 32 Tahun 2025, Bupati Belitunt Timur (Beltim) Kamarudin Muten melepas kirab Bangsa Kencana Kabupaten Beltim di Halaman Kantor Bupati Beltim, Senin (23/6). Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tahunnya pada tanggal 29 Juni dan tahun 2025 ini memasuki peringatan yang ke 32.

Bupati Beltim Kamarudin menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung program-program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

“Pemkab Beltim apresiasi atas pelaksanaan kirab Bangsa Kencana Kabupaten Beltim. Peringatan Hari Keluarga Nasional ini merupakan momentum bagi keluarga untuk kembali meresapi fungsi-fungsi dalam keluarga karena keluarga adalah pondasi utama dalam menciptakan generasi sehat dan cerdas,” kata Kamarudin.

Kegiatan kirab ini merupakan representasi gerakan nasional untuk menyadarkan masyarakat akan peran keluarga dalam menjawab tantangan bangsa. “Mari kita



Bupati Beltim Kamarudin Muten saat melepas kirab Bangsa Kencana Kabupaten Beltim di Halaman Kantor Bupati Beltim. (ist)

motor PLKB, mobil unit pelayanan KB dan mitra dengan menjelajah rute dari Kantor Minyak, Gajah Mada dan finish di Kantor Desa Kurnia Jaya Manggar.

Dalam kesempatan itu, di kantor Desa Kurnia Jaya digelar berbagai layanan publik, antara lain senam lansia, pemeriksaan kesehatan, pertemuan gerakan ayah teladan dan pemberian bantuan kepada masyarakat. (diskominfobelitim/as)

motor PLKB, mobil unit pelayanan KB dan mitra dengan menjelajah rute dari Kantor Minyak, Gajah Mada dan finish di Kantor Desa Kurnia Jaya Manggar.

Dalam kesempatan itu, di kantor Desa Kurnia Jaya digelar berbagai layanan publik, antara lain senam lansia, pemeriksaan kesehatan, pertemuan gerakan ayah teladan dan pemberian bantuan kepada masyarakat. (diskominfobelitim/as)

jadikan keluarga kita sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang, tempat generasi penerus kita dibesarkan dengan nilai luhur dan semangat untuk membangun Belitunt Timur yang akhirnya akan berdampak kepada Indonesia,” kata Kamarudin.

Dalam kirab Bangsa Kencana Kabupaten Beltim ini diikuti oleh puluhan kendaraan yang terdiri dari

Bupati Beltim, Situ Kolong

Rencana Pembelian Mobdin DPRD OKI Rp 5,1 M Jadi Sorotan

OKI, BN- Rencana penganggaran pembelian mobil dinas anggota DPRD Kabupaten OKI sebesar Rp 5,1 miliar mendapat kritik dari masyarakat. Salah satunya Aslulillah, ST, warga Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, Unyil begitu sapaan akrabnya, menilai hal itu seharusnya tidak dilakukan karena mobil dinas lama masih bagus untuk digunakan.

Apalagi saat ini Pemerintah Pusat bahkan Bupati OKI, H Muchendi Mahzareki, juga selalu mengingatkan untuk selalu efesiensi dalam penggunaan anggaran.

Harusnya kata Aslulillah, dewan memiliki rasa empati dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini defisit. Karena dana senilai Rp 5,1 miliar bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini masih banyak yang rusak.

Dirinya mencontohkan, jika dana tersebut dianggarkan untuk memperbaiki sekolah rusak sebesar Rp 500 juta. “Artinya ada 10 sekolah yang bisa diperbaiki mengapa tidak



DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) saat sidang.

mengakui jika mobil dinas yang ada di dewan masih sangat layak. Namun terkait adanya penganggaran untuk pengadaan mobil dinas. Menurut Mustamar itu hanya sebatas usulan.

“Namanya juga usulan belum tentu dikabulkan,” katanya.

Dikatakan Mustamar, pengajuan anggaran mobil dinas itu merupakan kesepakatan pimpinan dan anggota. Anggota DPRD OKI, Ayu Monaria, enggan berkomentar terkait rencana pengadaan mobil dinas tersebut. “Lebih baik tanyakan langsung dengan pimpinan. Karena pengadaan tersebut untuk unsur pimpinan saja. Anggota tidak ada.” jelasnya. (Nurtis)

melakukan hal yang seperti ini.” jelasnya, Rabu (25/6/25)

Namun, kata Aslulillah sebagai masyarakat kecil dirinya hanya bisa memberikan kritik. “Kami hanya bisa menyuarakan aspirasi saya. Urusan tersebut ada pada mereka. Ya kalau bisa dibatalkan pengadaan mobil dinas tersebut,” harapnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Partai Gerindra, Mustamar,



Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala, saat hadir Tabligh Akbar Peringatan 1 Muharram 1447 H. (ist)

Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala, saat hadir Tabligh Akbar Peringatan 1 Muharram 1447 H. (ist)

DPRD Gelar Rapat Propemperda Kabupaten Malang Tahun 2025

KAB.MALANG, BN – DPRD Kabupaten Malang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaksanakan Rapat koordinasi dengan Tim Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Malang pada Kamis, (3/7). Rapat tersebut dilaksanakan dengan agenda evaluasi beberapa peraturan daerah Kabupaten Malang dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malang Tahun 2025. Rapat yang dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Tim Raperda di antaranya Bagian Hukum serta OPD terkait antara lain direksi Perumda Tirta Kanjuruhan Malang.

Sebagai informasi, Tahun 2024 telah dilaksanakan pembahasan 8 Raperda, sehingga Raperda yang belum dibahas pada tahun 2024 akan dimasukkan dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tahun 2025. Diproyeksikan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tahun 2025 berjumlah 13 raperda dengan rincian 9 raperda yang berasal dari Bupati Malang dan 4 raperda yang berasal dr DPRD Kabupaten Malang.

Terkait Propemperda dan RPJMD. Salah satu agenda penting adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD 2025, di mana DPRD menekankan pentingnya konsistensi dengan RKPD 2025 dan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan APBD. Selain itu, ada juga pembahasan Raperda RPJMD 2025-2029 yang berfokus pada pemerataan infrastruktur. Di sisi lain, Satlinmas Kabupaten Malang juga sedang gencar melakukan sosialisasi Perda tentang Trantibum (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat)



Suasana rapat pembahasan propemperda Kabupaten Malang. (Nino Wiwantara)

pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, 3. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, 5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2030, 9. Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, 10. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, 11. Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan, 12. Pemberdayaan Masyarakat, 13. Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi.

Dalam pembahasan Propemperda, Perumda Tirta Kanjuruhan Malang mengusulkan Penyertaan modal Perumda Tirta Kanjuruhan Malang, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan memperkuat modal perusahaan. Dana penyertaan modal ini digunakan untuk pengembangan usaha, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Adv/Nn)

tahun 2025.

Adapun lampiran keputusan DPRD Kabupaten Malang nomor :188.4/35/kpts/35.07.100/2024 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malang tahun 2025, seperti dibawah ini : 1. Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kejari Sidoarjo Tahan Tersangka Korupsi BUMDes Jimbaran Kulon Wonoayu



: Dua tersangka kasus dugaan korupsi BUMDes Jimbaran Kulon, Wonoayu, Sidoarjo. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo resmi menahan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jimbaran Kulon, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (3/7/2025) malam.

Dua tersangka tersebut adalah MH, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Jimbaran Kulon sekaligus merangkap bendahara BUMDes, dan AR, pihak penjual aset tanah dan kios yang dibeli oleh BUMDes.

Kepala Kejari Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo, Jhon Frangky Yanafia Ariandi, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari rencana pembelian tanah dan bangunan kios oleh BUMDes Jimbaran Kulon pada tahun 2021.

Pembelian tersebut diinisiasi oleh tersangka MH yang mengakui aset itu akan dijadikan kantor BUMDes. Namun dalam prosesnya, MH diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

“MH memanipulasi harga pembelian tanah dan bangunan kios tersebut. Ia membeli dari AR dengan harga Rp130 juta, namun dalam laporan pertanggungjawaban dicatat seolah-olah pembelian dilakukan seharga Rp150 juta,” jelas Frangky.

Selain mark-up harga, penyidik Kejari Sidoarjo juga menemukan adanya ketidak-sesuaian alas hak tanah yang dibeli. Hal ini menyebabkan tanah dan kios tersebut bermasalah secara administrasi dan tidak dapat dicatatkan sebagai aset sah milik BUMDes. “Pembelian aset menjadi sia-sia karena tidak bermanfaat bagi BUMDes dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya,” tambahnya.

Akibat perbuatan kedua tersangka, negara dirugikan sebesar Rp150 juta sebagaimana hasil audit kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kejari Sidoarjo menyatakan proses hukum akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara ini. Kedua tersangka, kini ditahan 20 hari ke depan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. (Teddy Syah Roni)

Wamenpar RI Hadiri Tari “Segoro Topeng Kaliwungu” di Wisata Pantai Watu Pecak



Wamenpar RI, Ni Luh Puspa, bersama Bupati dan Wakil Bupati Kadis Pariwisata Kabupaten Lumajang bersama Penari Topeng.



LUMAJANG, BN- Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati yang akrab disapa Ni Luh Puspa, pada sambutannya event tari “Segoro Topeng Kaliwungudi Wisata Pantai Watu Pecak”, pada hari Minggu (29/06/25) festival tari “Segoro Topeng Kaliwungu” telah ditetapkan sebagai salah satu Kharisma Event Nusantara (KEN) oleh Kemenpar RI, salah satu caranya dengan event gelaran budaya bertajuk “Mystical of Kaliwungu” ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari manca negara yang ikut hadir juga pada pertunjukkan hari ini.

Kolaborasi antara penari topeng dari kalangan pelajar SMP dan SMA Lumajang yang betul-betul kompak dan memukau pengunjung yang hadir semuanya. “Tari Segoro Topeng Kaliwungu yang ditampilkan 500 penari, tentunya menjadi kebanggaan masyarakat Lumajang,” jelasnya.

Karena Event Segoro Topeng Kaliwungu 2025 ini, masuk kedalam 110 Kharisma Event Nusantara, “Kami dari Kementrian Pariwisata hadir disini karena event ini masuk kedalam salah satu Kharisma Event Nusantara (KEN), ada 110 yang di kurasi oleh tim independen untuk masuk kedalam Kharisma Event Nusantara tahun 2025 dan Lumajang akhirnya masuk melalui Segero Topeng Kaliwunguini,” ungkap Ni Luh Puspa.

Lebih lanjut, Wamenpar RI menyampaikan bahwa KEN ini memang tidak mudah untuk masuk, karena pertama harus konsisten kehadirannya ke publik, kemudian dampaknya harus jelas ke publik dan harus ada beberapa hal yang harus terpenuhi, baru bisa masuk ke KEN.”Selamat kepada ibu Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, serta kepada seluruh masyarakat Lumajang karena event ini sudah masuk KEN, kami berharap kedepannya mungkin ada event-event lain yang bisa masuk KEN lagi, kami juga mendorong event-event lain terus tumbuh tidak hanya masuk KEN tetapi juga bisa masuk ke kalender Of Event yang ada di Kementrian Pariwisata,” harapWamenpar RI.

Bupati Lumajang Bunda Indah menyampaikan terimakasihnya atas support dari Wakil Menteri Pariwisata RI dan Bupati Lumajang sangat berharap investor makin banyak yang masuk ke Kabupaten Lumajang. “Dukungan dari Kementrian Pariwisata, tentu luar biasa dan kedepannya semakin kita harapkan semakin besar terutama soal investasi, jadi kami sudah sampaikan kami butuh investor untuk membangun pariwisata kita,” ungkap Bunda Indah. (Son)

Kapolres Labuhanbatu ...

Sambungan hal 9

LABUHANBATU, BN – Kapolres Labuhanbatu Bersama PJU menghadiri kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H / 2025 M, yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini digelar di Gedung Serbaguna Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Jalan WR. Supratman, Kecamatan Rantau Utara, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Kegiatan Tabligh Akbar ini merupakan momentum spiritual yang dihadiri berbagai unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah dari berbagai kalangan. Acara diisi dengan tausiyah yang mengangkat tema “Jadikan Momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Sebagai

Sarana Menjalin Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah”

Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., “Kami menyambut baik kegiatan Tabligh Akbar ini sebagai ajang silaturahmi dan penguatan nilai-nilai keimanan di tengah masyarakat. Polri siap terus bersinergi dengan para ulama, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Kapolres.

Tabligh Akbar ini diharapkan menjadi titik awal yang baik dalam menyambut tahun baru Hijriah dengan semangat pembaruan diri dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Labuhanbatu.

(M.Sukma)

Walikota Probolinggo Dr. Aminuddin Resmi Buka Event Semipro 2025

PROBOLINGGO, BN- Semipro (seminggu dikota Probolinggo 2025 resmi dibuka pada hari Kamis (26/06/25) yang dihadiri Wakil Walikota Ina Dwi Lestari, ketua TP PKK dr. Evariani Aminuddin, For-kopimda, beberapa anggota DPRD Kota dan jajaran pejabat di pemerintah kota Probolinggo. Bahwa semipro adalah acara tahunan di Probolinggo yang menampilkan berbagai kegiatan seni, budaya dan pemberdayaan ekonomi lokal, yang mulai dibuka pada tanggal (26/06/25) sampai (04/07/25) diharapkan mampu mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah.

Walikota dr. Aminudin menyampaikan kekagumannya atas acara yang



Walikota Probolinggo Dr. Aminuddin saat membuka Event Semipro 2025. (ist)

dibuka pada hari ini, karena melibatkan semua elemen masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, “Komitmen kami dari awal, adalah naik kelas dan menunjukkan karya-karya lokal Probolinggo, ini adalah suatu puncak 100 hari kami bekerja dan memimpin kota Probolinggo,” jelasnya.

Ia juga menekankan

pentingnya dampak ganda penyelenggaraan Semipro. “Tidak hanya di Alun-Alun, Semipro juga hadir di lima kecamatan. Efek ekonomi akan berputar di seluruh kota. Cukup di Kota Probolinggo saja liburan anak-anak, melihat kreativitas, kebudayaan, dan potensi lokal,” terangnya.

Walikota juga menyampa

seluruh pihak yang terlibat, termasuk penggiat seni, pemuda, sponsor dan UMKM. Ia berharap Semipro mampu mengangkat citra Kota Probolinggo bukan hanya sebagai kota transit, melainkan kota tujuan wisata yang layak dikunjungi seperti temanya yaitu Mendorong Kreatifitas Lokal dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan Berkarya untuk Kota Probolinggo.

“Semipro juga untuk melestarikan budaya serta tradisi serta menjadi wadah inovasi dan kreativitas masyarakat,” jelas Asisten Administrasi Pemerintahan Madihah, saat menyampaikan laporan pada pembukaan Semipro. (Son)

Pelindo Regional 3 Jawa Salurkan 300 Paket Sembako Kepada Yatim Piatu

SURABAYA, BN – Direksi PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) di Jakarta menyalurkan sebanyak 12.000 paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada anak yatim piatu, panti asuhan dan anak-anak terlantar terdidik di seluruh Indonesia, namun manajemen Pelindo Regional 3 Jawa di Surabaya mendapatkan jatah 300 paket sembako dan diserahkan kepada pengurus masjid Baitul Hakam, Tanjung Perak untuk dibagikan.

Pembagian sembako dari PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo/Persero) Pusat secara simbolis tersebut dilakukan oleh Daru Yuliyanto Wicaksono, Executive Directur Pelindo Regional 3 Jawa pada Rabu siang (2/7/2025) di halaman masjid Baitul Hakam, Pelabuhan Tg.Perak, Surabaya kepada ratusan anak yatim piatu dan anak-anak terlantar terdidik di bawah pendidikan yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Hakam.

Ustad H.Sudarman, Ketua Takmir Masjid Baitul Hakam mengatakan, pihak PT.Pelindo Pusat menyalurkan sejumlah 12.000 paket sembako kepada anak yatim piatu dan anak terlantar terdidik di seluruh Indonesia dan untuk wilayah Surabaya diserahkan kepada manajemen Pelindo Regional 3 Jawa.

“Masjid Baitul Hakam mendapat amanah sebanyak 300 paket dan berhasil dibagikan semua hari ini, alhamdulillah kami senang anak-anak dapat semua,” ujar mantan direktur keuangan Pelindo III (Persero) di bawah tahun 2021 tersebut pada media ini di kantornya.

Acara yang berjudul “Pelindo Berbagi Sembako Pelindo Day Tahun 2025 itu, menurut Ustad Sudarman, merupakan kegiatan sosial terkait Pelindo Day 2025 yang dilakukan bertepatan pula dengan bulan Muharam, awal tahun baru Islam 1447 Hijriyah.

Pihaknya menerima amanah dari instansi manapun dan



Berdiri di belakang Daru Yuliyanto Wicaksono (dua dari kanan) foto bersama dengan beberapa anak yatim piatu mewakili ratusan yang lain. (Foto: Ak/BN)

sudah empat kali ini mendapat kepercayaan Pelindo untuk membagikan sembako kepada anak yatim piatu. “Yayasan pendidikan Al-quran didirikan pada tahun 2011, sudah 14 tahun ini kami mendidik mereka dengan tekun dan sabar,” kata Ustad Supardi dalam sambutannya.

Dikisahkan Supardi, pada awal mendapatkan ratusan anak yatim piatu dan anak-anak terlantar itu pihaknya merasa prihatin melihat mereka di jalanan yang tak diperhatikan orangtuanya. “Kami selidiki tempat tinggalnya, ada yang kos di kamar ukuran 2m x 2m dihuni 4 anak dan ukuran 2m x 3m dipakai 7 anak. Tempat kos yang sangat tidak layak”, kata Supardi dengan suara rendah.

Setelah pihaknya berhasil melakukan pendekatan secara psikologis kepada anak-anak tersebut, kemudian mereka mau mengikuti pendidikan ke jalan yang baik dan benar. “Kami sedih dan prihatin mendengar cerita mereka. Kemudian kami datangi orangtua mereka masing-masing meskipun tempatnya cukup jauh. Dan orangtuanya merelakan dan menyerahkan kepada kami untuk dididik kepada ajaran agama. Sekarang mereka rajin sholat dan pandai membaca Alquran,” jelas Supardi.

Pihaknya sampai menghabiskan biaya rata-rata Rp 100 juta tiap tahun dalam rangka pendidikan mereka buat beli pakaian seragam dan lain-lain. “Kami menyadari keadaan ekonomi sekarang sedang sulit, tapi kami terus menerima anak-anak untuk belajar sholat dan membaca Alquran secara gratis setiap hari,” papar ustad Supardi. (Akariem)

MAKI Desa KPK ...

saksi dalam kasus pengelo- laan dana hibah yang ber- sumber dari Anggaran Penda- patan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2019-2022 lalu.” kata Komaryono, Rabu, 02 Juli 2035.

Lebih lanjut ia menyam- paikan, bahwa MAKI yang di koordinatori Bonyamin Saiman sangat serius agar KPK segera untuk menun- taskan kasus korupsi meng- hebohkan warga Jawa Ti- mur, dan sekaligus mantan

menteri sosial hanya panggil sebagai saksi persoalan hibah APBD Tahun 2019- 2022 harus menghormati panggilan lembaga anti rasuah tersebut, “KPK harus tegas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu harus ditindak,” harap Komar- yono selaku sekjen MAKI.

Terkait dengan pembe- ritaan dalam salah satu me- dia yang mengatasmakan MAKI Jawa Timur yang akan mendampingi Khofi-

fah jika di panggil KPK saat di konfirmasi awak Media dengan tegas membantah adanya pernyataan itu, dan mereka di luar yang lem- бага yang ia pimpin sama Bonyamin. Mereka tidak dalamstrukturMAKI,“MAKI, kita mendirikan cabang di manapun, hanya MAKI di bawahkoordinatorBonyamin, dan Komaryono selaku Sekjen, Jika ada segilintir or- ang yang mengaku MAKI yang menyatakan hal-hal

Sambungan hal 1

seperti itu, bukan dari ang- gota MAKI hanya mengatas- namakan saja,” tandasnya. Dikatakan Sekjen Komar- yono, MAKI yang sebenar- nya, adalah mendukung ki- nerja KPK yang anti rasuah, tidak hanya itu jika dalam pemeriksaan saksi ditemu- kan ketelibatannya, statu- nya bisa di naikkan menjadi tersangka, siapa pun orang- nya, “sehingga dari saksi bisa ditetapkan tersangka,” tegasnya. *(husnan)*

Sambungan hal 1

dan mengecewakan masyarakat. Selain lambat dikerjakan, sejumlah material datangnya juga dicicil tidak mencerminkan sebagai kontraktor besar yang mengerjakan proyek milyaran. Belum lagi kualitas material yang didatangkan sudah Standar Nasional (SNI) apa belum. “Kami sangat kecewa mengapa proyek milyaran sebesar ini kok pelak- sanaannya kurang professional, selain lambat kualitas materialnya juga diragukan,” kata Djoni pegiat LSM Kobra.

Hingga berita ini diterima ke Redaksi BN, Tim Wartawan dan LSM Kobra belum berhasil mengkonfirmasi Kemen- terian PU, Dirjen Prasana Strategis, Satuan Kerja Pelaksa- naan Prasarana Stategis di Jln.Raya Menganti Wiyung Surabaya, Provinsi Jatim. Begitu juga kontraktor PT Lince Romauli Raya dan PT Bina Karya (KSO) belum berhasil ditemui BN. Tim hanya bertemu sejumlah pekerja kasar di lapangan yang tidak ada kompetensi untuk menjelaskan proyek prestisius ini.

(Tim BN)

Sambungan hal 1

“Untuk desa Deru kecamatanSumberejo belum ada izin, namun akan kami cek apa betul pohon tersebut merupakan aset Pemkab atau berada di lahan pemkab Bojonegoro, jika benar itu berada di lahan Pemkab akan ada tindakan dari DLH, karena melanggar Perda akan ada,penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS)

yang menanganinya,” katanya.

Perlu diketahui mulai beberapa hari yang lalu Pemdes Deru kecamatan Sumberejo melakukan penebangan pohon yang berjenis Mauni dan Jati di sepanjang jalan PUK desa setempat tanpa izin terlebih dahulu ke DLH.

(tim)

Sambungan hal 2

sekali,” ujanya. Selain itu, Bupati juga meminta camat dan kepala desa untuk membangun komitmen bersama warga agar kebersihan wilayah te- tap terjaga pasca kerja bakti. “Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab

bersama. Saya minta camat dan kepala desa memastikan wilayahnya tetap bersih. Ja- ngan sampai setelah diber- sihkan, kembali kotor hing- ga menjadi viral lagi karena banyak warga yang melintas di kawasan tersebut,” pung- kasnya. *(yah)*

Sambungan hal 4

ingatan awak media, terdapat beberapa faktor dan/atau unsur yang menguatkan tentang pendapat penulis terhadap figur atau sosok dari seorang Maskuri, S.Pd, Kasek UPT SD Negeri 222 Gempol Kurung, sekaligus Ketua K3S kecamatan Menganti, Gresik.

Pertama, makmur financial dan sangat berkah siklus perputaran keuangan dalam setiap bulannya diseluruh UPT SD Negeri se-Kecamatan, Menganti, bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Gresik.

Puluhan awak media ditambah para personal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengamatan awak me- dia Bidik Nasional & BIDIKNASIONAL.com tidak pernah ada yang ditolak dalam berkunjung pada setiap bulannya, bahkan ada menyampaikan (Kasek) lebih dari satu kali dalam setiap bulannya.

Selain artinya pasti ada beaya yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk mereka, juga tidak memperma- salahkan bahwa jika dalam setiap bulannya lebih dari satu kali berkunjung, cermin makmurnya kerajaan Majapahit pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk.

Gairah dengan cerita-cerita yang berhubungan lawan jenis, bukan berarti hiper, mengingat semua guru yang ada selalu mencium tangannya bila bersalaman dengan Kasek Maskuri,S.Pd, bahkan, tidak hanya guru yang berada dalam ruang lingkup sekolahnya saja, namun guru dari seluruh UPT SD Negeri se-Kecamatan, Menganti, potret laksana raja diatas singgasananya.

Unsur yang lain, yang menguatkan bahwa penye- lenggaraan pendidikan dalam ruang lingkup UPT SD Negeri se-Kecamatan Menganti, Gresik, sangat luar biasa istimewa kemakmurnanya adalah fee-fee yang cukup lumayan mudah sekali didapatkan, yang tidak pula dibare- ngi oleh lembaga pendidikan diluar kecamatan Menganti, menjadi sebab selain dipadati oleh masyarakat yang bergaya hidup kota atau modern, yang tidak mempermasalahkan kost beaya demi memajukan program pendidikan.

Wakil ketua K3S yang sangat ksatria dan pemberani menghadapi apapun dan siapapun, terbuka dengan selalu memenuhi panggilan pihak berwajib atas dugaan-dugaan yang disangkakan terhadapnya oleh mereka insan atau kelompok yang mengatasmakan kontrol sosial dan tidak terbuka.

Berkonsekwi, terhadap pribadinya yang tidak segan- segan mengajak duel terhadap siapapun mereka yang jelas tidak bertabiat baik atau merusak, adalah cermin dari kepribadian Sang Maha Patih Gajah Mada.

Singkatnya, adalah titik terang dengan apa telah disembunyikan atau ditutup-tutupi selama ini oleh Maskuri, S.Pd, khususnya dirinya selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah kecamatan Menganti kabupa- ten Gresik, bahwa hikmah besar yang dapat diambil adalah soliditas organisasi sangat butuh pengorbanan, tidak hanya pengorbanan materi, perasaan dan terlebih harga diri, tutupnya berpesan. *(Subhan Arif)*

ICW Desak ...

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam keterangan resminya, Kamis, 3 Juli 2025.

Sebelumnya pada 26 Juli 2025, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satjker PJN Wilayah I Sumut. Dua hari kemudian, KPK me- netapkan 5 orang tersangka termasuk Topan Ginting. Tersangka lainnya ada- lah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dae- rah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Dirut PT DNG M. Akhirun Efendi Siregar dan Direktur PT RN M. Rayhan Dulasmi Piliang. Mengutip *Harian Tempo* edisi

Sambungan hal 1

Kamis, 26 Juni 2025, Topan Ginting memiliki kedekatan dengan Bobby, menantu mantan presiden, Joko Widodo. Topan bahkan dijuluki sebagai ketua kelas di lingkungan pemerintahan Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara.

Topan adalah bawahan Bobby sejak suami dari anak Jokowi Kahiyang Ayu itu menjabat sebagai Wali Kota Medan. Kala itu ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi. Lalu di 2024, Bobby menunjuknya sebagai pejabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Sete- lah Bobby terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara Topan ikut diboyong dan menempati posisi Kepala Dinas PUPR. Diduga kuat Kadis PU ada kedekatan khusus dengan gubernur menantu Jokowi ini. **(red)**

Sambungan hal 3

Proyek Jalan Rabat ...

Hal ini dapat berdampak pada umur bangunan yang pendek,sering kali membutuhkan perbaikan lagi atau bahkan pembangunan ulang, yang pada akhirnya menimbulkan biaya tambahan bagi negara.

Dan ini muncul karena jalan yang baru selesai dikerjakan sudah memperlihatkan kerusakan, seperti retak, aus dan berdebu. Hasil investigasi awak media Bidik Nasional (BN) di lapangan Selasa (20/5) pekerjaan tersebut kwalitasnya buruk.

Di samping banyak keretakan pada bangunan tersebut, sehingga menyebabkan pengelupasan karena pasta semen tidak dapat menempel dengan baik. Pengelupasan selimut beton (honeycomb) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk melekatnya material asing atau abrasi oleh benda padat. Juga pada pengelupasan permukaan beton yang disebabkan oleh pengeringan atau pengerasan yang terlalu cepat, diduga bahwa hasil yang tidak maksimal tersebut akibat lemahnya dari pengawasan dalam proyek tersebut.

Selain itu juga tampak dalam Papan Nama Proyek, bahwa pihak Pelaksana adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa tentunya persiapan pra pelaksanaan harus maksimal . Sarana transportasi jalan bagi masyarakat sangat dibutuhkan kenyamanan untuk beraktivitas, namun jika dibangun kemudian hasilnya tidak maksimal tentunya berakibat buruk, bahkan tidak jaman untuk dinikmati.Akibatnya dana yang dimanfaatkan terbuang sia-sia, masyarakat mesti nya sangat dirugikan.

Salah satu masyarakat yang enggan namanya di sebut saat di konfirmasi awak media menuntut pembangunan jalan rabat beton ini baru beberapa bulan dikerjakan dan sudah mengelupas dibeberapa titi. Sementara hingga sampai saat ini Kepala Desa Perak belum berhasil di temui BN.

Camat Perak ketika di temui Wartawan BN, mengatakan, “Kepala Desa Perak kalau mengerjakan proyek di desanya hasilnya baik, dan orangnya bertanggung jawab,” ujarnya. Menurut warga setempat,” Masak anggaran sebesar itu ,hasilnya kayak gitu, apa ini yang di namakan korupsi, padahal itu proyek baru dikerjakan sudah banyak yang mengelupas dan retak. **(Tok)**

Paripurna Penetapan ...

bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. “Selanjutnya akan disampaikan kepada Gurbernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuang- an untuk dievaluasi,” ujar Hadi Atmaji.

Disampaikan bahwa perlunya dorongan kepada OPD untuk berinovasi demi pelay- anan kepada masyarakat dan kemajuan kabupaten Jombang. Penguatan SDM ber- kualitas, sehingga Inspektorat bisa melaku- kan tugas pokok fungsinya.

Pada RKP 2025 nantinya pada penguatan fondasi transformasi dengan tema “Akse- lerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melau- lui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi Sumber Daya Manusia ber- kualitas melalui peningkatan kualitas pendid- ikan dan kesehatan serta penguatan karak- ter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Ber- kualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas.

“Kemudian pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Eko- nomi Inklusif dan berkelanjutan, yang diha- rapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Saat itu juga, Bupati Jombang menyam- paikan ucapan terima kasih atas kesepakatan bersama ini. Dalam kesepakatan bersama itu, nantinya pendapatan Kabupaten Jombang

Sambungan hal 3

diproyeksikan sebesar Rp 2,85 triliun. Dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat sebesar 25,72% menjadi Rp.745.549.706.014.

Perlu diketahui bahwa pada peningka- tan ini dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proyeksi pendapatan asli daerah Kabupa- ten Jombang tahun 2025 dari Pajak Daerah: Diproyeksikan meningkat 73,36% menjadi Rp.312.372.602.400. Untuk Retribusi Daerah diiproyeksikan menurun 21,32% dari tar- get tahun 2024 menjadi Rp.16.051.817.827.

“Sedangkan hasil Pengelolaan Kekaya- an Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan meningkat 0,82% menjadi Rp.8.273.752.694. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat 6,41% menjadi Rp.408.851.533.093. Dan peningkatan pendapatan asli daerah ini berkontribusi sebesar 30,55% terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Jombang,” ujar Ketua DPRD Jombang.

Pada rapat kesepakatan bersama itu, bahwa proses pengesahan dan suatu peraturan daerah melibatkan penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati Jombang, yang kemudian dite- tapkan menjadi peraturan daerah setelah disetujui dalam rapat paripurna dan di sahkan oleh Bupati.

(Tok)

Sambungan hal 4

yang telah di laksanakan selama 100 hari kerja pada masa kepemimpinannya di kabupaten Pamekasan.

Diantaranya,yakni program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan (Paduka), Petani Bangkit, Pesantren Tangguh, Peternak Digdaya,Retorasi Pamekasan Bertema juga penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian, program bantuan jergen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang juga dilengkapi dengan barcode untuk para nelayan, program Pamekasan sehat, kampung lansia sehat, lansia sejahtera, santri bebas anemia, pemeriksaan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa, dan program inovatif lainnya. “Program kegiatan-kegiatan itu, sebagai bukti bahwa kami bupati dan wakil bupati kedepannya akan terus bekerja dengan baik bahkan akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan dalam rancangan program jangka menengah daerah (RPJMD) secara merata di setiap 13 kecamatan se kabupaten pamekasan demi kemajuan bersama dalam membangun kota gerbang pamekasan ke arah yang lebih baik, “Capaian program dalam 100 hari kerja ini hanya menjadi pemantik untuk melanjutkan lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Sementara menurut wakil bupati Pamekasan Sukriyanto berharap dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di Pamekasan untuk mengawal demi suksesnya setiap program pemerintah daerah baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan di jalankan, sehingga pembangunan di kabupaten pamekasan akan terwujud dengan baik sesuai harapan kita Bersama, “Saya berharap partisipasi altif dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil dalam mensukseskan program pemerintah daerah, sebab kami yakin tanpa ada dukungan dari masyarakat program yang kami rancang,mustahil bisa terealisasi dengan baik,” harapnya. *(khotis)*

Ketua DPRD Magetan Kunjungi Puskesmas Panekan



Ketua DPRD Magetan Ratno didampingi Kepala Puskesmas Panekan Drg. Ari Wibawa saat mengunjungi Gedung Puskesmas Panekan.

MAGETAN, BN - Proyek berkelanjutan bangunan Puskesmas Panekan yang diharapkan Kepala Puskesmas Panekan Drg. Ari Wibawa bisa dilanjutkan untuk tahun 2025. Ketua DPRD Magetan, Ratno, Rabu (18/6) meninjau langsung bangunan tersebut, bahkan Ratno menyempatkan diri memeriksakan kesehatan di Puskesmas tersebut.

Pemeriksaan kesehatan meliputi laboratorium, phisik, kolesterol, tekanan darah dan sebagai nya, Ratno pun mengikuti dari pengecekan tekanan darah, gejala penyakit diabetes dan lain-lain.

Seusai memeriksakan kesehatan diri, kemudian meninjau juga kinerja dan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas termasuk ruang rawat inap yang ada sambil menanyakan para pengunjung yang antri atau pun yang berada di rawat inap.

Ratno berkomentar saat usai memeriksakan kesehatan diri, memberikan apresiasi kepada para staf puskesmas Panekan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara bagus.

“Berdasarkan program Visi Misi Bupati saat mencalonkan bupati kemarin, untuk itu setelah itu visi misi tersebut diwujudkan dan diselaraskan dengan program Gubernur Jawa Timur dan Nasional, maka peningkatan status Puskesmas ke rumah sakit sangat perlu baik dari segi sarana dan prasarana perlu diadakan dan sediakan termasuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ke masyarakat tidak boleh diabaikan,” kata Ratno.

Akhir kata Ratno pun mengucapkan, untuk Komisi C segera turun langsung ke Puskesmas-puskesmas terkait progres pelayanan kesehatan gratis yang ada sampai sejauh mana kegiatan tersebut terlaksana karena pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara gratis, Kabupaten Magetan berada di posisi 4.

Himbauan Ratno Ketua DPRD, Kepada seluruh masyarakat Magetan di ajak untuk memeriksakan kesehatan diri secara gratis di Pukesmas-puskesmas dan posyandu yang ada di seluruh Kabupaten Magetan dan saat posisi dimana pun berada atau beda kecamatan tempat tinggal tiada masalah. “Untuk progres pembangunan puskesmas Panekan Tahun 2025 dilanjutkan karena telah dianggarkan, ucap Ratno pula.

Keterangan langsung dari Drg. Ari Wibawa Kepala Puskesmas Panekan Magetan, penyediaan rawat inap yang normal 38 kamar, untuk Rumah Sakit Type D harus mempunyai sarana rawat Inap 50 kamar, sehingga hanya menambah sedikit saja penyediaan kamar rawat inap saja. (Adv/Ashar)

Bupati Labuhanbatu Tolak Mobil Dinas Baru, Anggaran Rp 2,3 M Dialihkan untuk Penanganan Sampah



Bupati Labuhan Batu dr Hj. Maya Hasmita Sp. OG M.KM. a

LABUHANBATU, BN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, sebelumnya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 2.339.000.000 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk pengadaan mobil dinas baru dalam jabatan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu.

Alih-alih menikmati kemewahan dari fasilitas negara sebagai pejabat publik, Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, dr Hj. Maya Hasmita Sp. OG M.KM dan H. Jamri ST, justru menolaknya. Keduanya meminta, anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk program yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Penolakan ini, menunjukkan komitmen Bupati Labuhanbatu terhadap Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBN 2025. Maya Hasmita lebih memilih untuk mementingkan pembangunan, daripada harus menghamburkan uang APBD hanya untuk pengadaan mobil dinas baru.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu, Salman Alfari Rambe S.Sos MM, ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/7), membenarkan adanya penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu yang ditampung dalam APBD tahun 2025.

“Pengadaan mobil dinas baru dalam jabatan bupati dan wakil bupati itu dihapus, dan akan dialihkan untuk fokus pada penanganan sampah, serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu,” jelasnya.

Dia menyebut, penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas baru, merupakan arahan dan kebijakan langsung dari Bupati Labuhanbatu. Kata Salman, bupati lebih memilih menggunakan mobil dinas lama, dan mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam penanganan sampah. “Ibu (bupati) lebih memilih menggunakan mobil dinas yang lama. Bupati meminta pengadaan mobil dinas baru agar dialihkan ke belanja lain yang lebih bermanfaat kepada masyarakat,” kata Salman.

Anggaran itu, jelasnya, akan dibelanjakan untuk pengadaan truk pengangkut sampah dan box kontainer yang akan ditempatkan di Aek Nabara, dan kawasan pesisir pantai. Sesuai arahan bupati, pengalihan anggaran ini diminta secepatnya dilaksanakan untuk mendukung penanganan sampah di Labuhanbatu. “Intinya, ibu bupati mau anggaran ini dialihkan secepatnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan dan mengoptimalkan penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu,” tutupnya. (M.SUKMA)

Satpol PP Magetan Bea Cukai, Polisi dan Kejaksaan Kembali Gelar Operasi Gempur Rokokl legal



Tim gabungan Satpol PP Magetan, Bea Cukai, Kepolisian dan Kejaksaan saat sidak langsung Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Parang, Poncol dan Plaosan Kabupaten Magetan. (Ashar)

MAGETAN, BN - Bulan Mei 2025 dan Juni 2025 ini tim gabungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan bidang Penegakan Perda (Gakda) bersama Bea Cukai Madiun dan Aparat Penegakkan Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Magetan melakukan operasi Gempur Rokokl legal.

Operasi yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juni 2025 di tiga lokasi Kecamatan, yaitu Parang, Poncol dan Plaosan. Tim menyusuri toko-toko dan warung-warung dan sebagainya hasil nya pun nihil.

Wartawan Bidik Nasional (BN) pun mengikuti operasi pada hari pertama (24/5) di lokasi Kecamatan Plaosan Magetan dari toko ke toko dan dari warung ke warung, namun hasil nya kosong dalam operasi gabungan Gempur Peredaran Rokok Ilegal dan hasil nya juga sama dengan di 2 kecamatan lainnya.

Twintan dari kejaksaan yang merupakan salah satu tim gabungan menyampaikan saran kepada pemilik toko dan atau pun warung bahwa, jangan tergoda rayuan Sales (penjual) yang menawarkan rokok ilegal untuk dijual kembali, meskipun harga murah.

“Dampak nya bila ibu pemilik toko/warung membeli nya dan terus menjual kembali akan merepotkan kembali kepada bapak/ibu kedepannya, paling tidak panjenengan akan direpotkan dengan pikiran dan waktu agak lama untuk penyelesaian penjualan rokok ilegal,” kata Twintan.

Silih berganti antara petugas Satpol PP, Bea Cukai, kepolisian dan kejaksaan sesaat sebelum meninggalkan toko atau pun warung tersebut agar mereka tidak akan menjual rokok ilegal sampai kapan pun, karena bagi pembeli akan lebih berbahaya dampak kadar Nikotin yang tidak terdeteksi, bagi pemerintah tidak ada pajak yang masuk ke Negara dan masyarakat pun juga dibuat rugi akibat dari pajak rokok ilegal tidak masuk ke Negara, sehingga Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau tidak ada kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri khusus nya di bidang Kesehatan.

Gunendar mengutarakan, meskipun indikasi peredaran rokok ilegal masih terjadi secara terselubung, pihaknya tetap secara rutin mengadakan patroli baik secara langsung seperti saat ini atau secara lain nya dan meskipun sistim peredaran rokok ilegal jauh berbeda seperti hal nya pemanfaatan platform online dan atau bisa juga distribusi dari rumah ke rumah atau langsung perorangan.

“Berdasarkan hal itu, kami terus menjalin kerja sama dengan aparat desa, tokoh masyarakat serta memaksimalkan peran Satgas Rokok Ilegal di tingkat Kecamatan secara intensif,” ujar Gunendar.

Ia berharap kolaborasi ini mampu menciptakan kesadaran yang lebih luas di masyarakat agar tidak lagi mengonsumsi, memproduksi, maupun mengedarkan rokok ilegal.

Gunendar pun menjelaskan, bahwa dari hasil gelar operasi secara langsung dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan saat Tahun 2022 hingga Tahun 2024 mengalami penurunan yang arti nya para penjual dan para pembeli rokok ilegal sudah memahami dan mempunyai kesadaran tinggi tentang Rokok Ilegal sangat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

“Meskipun hasil operasi di Tahun 2024-2025 ini tidak seperti operasi yang dilakukan di Tahun 2022 - 2023 masih menemukan peredaran rokok ilegal di toko-toko dan atau pun diwarung-warung namun di Tahun 2025 ini minim sekali temuan peredaran adanya rokok ilegal,” ucap Gunendar. (Adv/Ashar)

Tim Gabungan Sisir Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Karangrejo Magetan



Tim gabungan penyisiran Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Karangrejo Magetan.

MAGETAN, BN - Penyisiran kembali peredaran rokok ilegal di hari ke dua di tiga kecamatan Kabupaten Magetan yaitu ; Kecamatan Karangrejo, Barat dan Kartoharjo oleh tim gabungan Satpol PP (Bidang Penegakkan Perda) dan Damkar Magetan, Bea Cukai Madiun dan Polres serta Kejari Magetan, Kamis (19/6).

Seperti biasa nya, sebelum berangkat menuju penyisiran toko-toko dan warung tim Gempur Rokok Ilegal mengadakan apel pagi dan Gunendar Kepala Penegakkan Peraturan Daerah (Gakda) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) & dan Damkar Kabupaten Magetan memberikan penjelasan, bahwa program kerja merupakan yang berkelanjutan dalam rangka fasilitasi dan pengawasan bersama terhadap peredaran barang ilegal terlebih lagi rokok ilegal TANPA PITA CUKAI.

“Pelaksanaan hari ini ke tiga Kecamatan yaitu ; Kecamatan Karangrejo, Barat dan Kartoharjo dan terbagi dalam tiga tim dalam operasi bersama Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Magetan,” ucap Gunendar.

Bidik Nasional (BN) Biro Kabupaten Magetan turut serta dalam penyisiran dalam tim Kecamatan Karangrejo di desa Grabahan, Kauman, Patihan, Karangrejo, Sambirembe dan Gondang, namun dalam penyisiran tersebut ditemukan adanya penjualan rokok ilegal khusus nya rokok tanpa dilekatkan pita cukai atau pelekatan pita cukai tanpa tempat semestinya yaitu pita cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dilekatkan pada rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau pun SKM yang seharusnya 20 batang rokok dalam satu bungkus pita cukai malah dilekatkan pita cukai yang isi nya 12 batang rokok.

Menurut Gunendar, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini, baik oleh Satpol PP, Bea Cukai Madiun, maupun peran media, telah membuahkan hasil positif.

Sejak dari awal Bidik Nasional mengikuti tim penyusuran peredaran rokok ilegal yang terdiri dari Bidang Gakda Satpol PP Magetan, Bea Cukai Madiun, Polres dan Kejari Magetan dengan santun dan sopan menanyakan perihal ada nya tawaran dari para sales / penjual yang menawarkan rokok ilegal kepada pemilik toko dan ataupun warung-warung disinggahi dan meskipun di jawab tidak dan ada ya akan tetapi mereka menolak nya karena dampak nya bila menjual rokok ilegal kedepannya bikin rumit bila sudah berhubungan dengan hukum.

Pertanyaan itu dilontarkan ketika usai memeriksa secara teliti dan cermat. Asrori bidang Gakda mengatakan, Toko-toko dan warung tidak ditemukan ada nya penjualan ciri-ciri rokok ilegal, mereka pemilik toko atau pun warung sudah memiliki kesadaran tinggi dalam hal menjual rokok ilegal.

Gunendar Kabid Gakda Satpol PP bersama tim penyisiran rokok ilegal dilapangan tidak menemukan ada nya peredaran rokok ilegal, akan tetapi Gunendar tetap mencatat adanya pergeseran modus penjualan rokok ilegal dengan peredarannya tidak lagi terbuka di toko dan warung melainkan secara tertutup oleh perorangan kepada konsumen secara perorangan dan kemungkinan juga dilakukan penjualan melalui sistem online. “Sistem penjualan pun berubah maka merupakan tantangan baru bagi kami, karena mereka melakukan transaksi penjualan dari rumah per rumah dan tidak secara umum, untuk kami telah berkoordinasi dengan Bea Cukai Madiun untuk dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis dalam menghadapi pola baru ini,” ujar Gunendar.

Kata Gunendar pula, harapan kedepannya akan ada prosedur dan mekanisme penindakan yang lebih efektif terhadap mereka yang telah mengambil keuntungan dari transaksi rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi. Gunendar berharap, ke depan akan ada prosedur dan mekanisme penindakan yang lebih efektif terhadap oknum yang masih mengambil keuntungan dari penjualan rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi.

“Bukan saja Satpol PP, akan tetapi Bea Cukai juga akan menyusun tata cara penindakan terhadap pelaku penyebaran rokok ilegal yang menggunakan jalur tertutup,” ungkap nya pula. (Adv/Ashar)